



**MODEL-MODEL PEMBERDAYAAN RUMAH IBADAT
AGAMA HINDU DI KOTA DENPASAR**

Oleh:

**DR. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag., M.Hum
H. Selamat, S.Ag., SQ.**

Hasil Penelitian yang dipublikasikan dalam
Seminar Hasil Penelitian di Lingkungan Puslitbang Kehidupan Keagamaan,
Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia
Tahun 2014

**PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2014**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN**

Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lt. 19
e-mail: puslitbang1.balitbangdiklat.kemenag.go.id
JAKARTA

Surat Keterangan

Nomor: P.I/HM.01/1200/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Muharam
NIP : 19630204199403 1 002
Jabatan : Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat,
Kementerian Agama

dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul: **“Model-Model Pemberdayaan Rumah Ibadat Hindu di Kota Denpasar”** yang disusun oleh **Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag., M.Hum** dan **H. Selamat, S.Ag., SQ** memang benar dilaksanakan atas biaya DIPA Badan Litbang dan Diklat Tahun 2014, dan telah dipublikasikan dalam Seminar Hasil Penelitian di lingkungan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Tahun 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Desember 2016
Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

H. Muharam Marzuki, Ph.D.
NIP. 19630204199403 1 002

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat
2. Sekretaris Badan Litbang dan Diklat

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
B. Tinjauan Pustaka	4
C. Metodologi Penelitian	5
D. Kerangka Teori	6
1. Modal Sosial	6
2. <i>Total Quality Management (TQM)</i>	9
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	13
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	13
B. Kehidupan Keagamaan Umat Hindu di Kota Denpasar	15
C. Pura sebagai Tempat Suci Umat Hindu	20
D. Fungsi Pura dalam Kaitannya dengan <i>Tri Hita Karana</i> dan <i>Tri Mandala</i>	22
BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Model Pemberdayaan <i>Pura Desa</i> dan <i>Pura Puseh</i> Desa Pakraman Ubung	24
1. Profil Pura dan Umat <i>Pengempon</i>	24
2. Pengelolaan Dana dan Optimalisasi Modal Sosial	26
3. Kegiatan Pelayanan Ibadat, Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Pemberdayaan Umat	28
4. Faktor Pendukung dan Penghambat	31
B. Model Pemberdayaan <i>Pura Subak Pakel II</i> Desa Pakraman Ubung Kaja	32
1. Profil dan umat <i>pengempon</i>	32
2. Pengelolaan Dana dan Optimalisasi Modal Sosial	35
3. Kegiatan Pelayanan Ibadat, Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Pemberdayaan Umat	37
4. Faktor Pendukung dan Penghambat	39
BAB IV PENUTUP	41
A. Simpulan	41
B. Rekomendasi	42
Daftar Pustaka	44

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

Rumah ibadat memiliki peran dalam pembinaan umat masing-masing agama, khususnya di bidang keagamaan. Rumah ibadat biasanya dimaknai sebagai ruang sakral, di mana fungsinya sebagai tempat melaksanakan ibadat dan tempat/ruang suci yang harus terpisahkan dengan aktivitas-aktivitas duniawi. Sebagai tempat suci maka rumah ibadat berbeda dengan bangunan atau tempat lain seperti sekolah, balai pertemuan, gedung perkantoran, atau pasar. Henri Lefebvre (1971) mengartikan ruang sakral tersebut dengan istilah *second nature* (alam kedua) di mana kondisi obyektif ruang telah ditransformasikan dan dimaknai secara sosial dan historis sebagai tempat suci. Bagi kaum tradisional rumah ibadat diperlakukan sebagai *fetishism of space* sehingga tidak ada peluang aktivitas non ibadat. Hal yang sama dapat dilihat dari bagaimana umat Hindu membagi tempat suci ke dalam beberapa struktur dan hirarkhis.

Namun demikian, di samping berfungsi dalam kegiatan keagamaan rumah ibadat juga berfungsi bagi tempat pelaksanaan aktivitas sosial bagi umat atau masyarakat di lingkungan sekitar. Di Bali, umat atau masyarakat sekitar pura adalah mereka yang menjadi *pengempon*¹ yang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan dan pelaksana dari seluruh aktivitas keagamaan. *Pengempon* ini sangat tergantung dari klasifikasi pura dan pembinaan serta pemberdayaan *pengempon* sangat erat kaitannya dengan tujuan agama Hindu, salah satunya melalui konsep *Tri Hita Karana* (hal ini akan dijelaskan secara luas pada bagian lain).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat persoalan yang berkaitan dengan manajemen (pengelolaan) rumah ibadat. Pada satu sisi, ada rumah ibadat yang hanya difungsikan oleh pengelolanya hanya sebatas ruang untuk tempat beribadat atau pembinaan keagamaan, namun pada sebagian rumah ibadat lainnya, peran rumah ibadat juga telah difungsikan untuk kegiatan sosial, pemberdayaan umat, bahkan pengembangan ekonomi.

¹ *Pengempon* adalah istilah untuk menyebut kelompok atau komunitas yang memiliki tugas pokok untuk memelihara, mengelola dan melaksanakan upacara keagamaan pada sebuah pura, tergantung klasifikasi pura tersebut. Contoh, *pengempon Pura Kawitan* adalah keluarga inti, *Pura Subak* adalah para petani, *Pura Melanting* adalah para pedagang, *Pura Kahyangan Tiga* adalah *krama desa pakraman*, dll.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010-2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Buku II Bab II Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, dijelaskan bahwa:

“Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memberikan fasilitas dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga tersebut. Berkaitan dengan kualitas beragama yang belum optimal, dinyatakan bahwa pelayanan kehidupan beragama masih terbatas, untuk itu pemerintah perlu lebih meningkatkan perannya dalam memberikan pelayanan dan fasilitas kepada umat beragama dalam menjalankan aktivitas keagamaannya dengan mudah dan aman. Melihat peran rumah ibadat yang begitu penting dan strategis, maka banyak dukungan diberikan terhadap rumah ibadat baik oleh masing-masing jamaah rumah ibadat dan masyarakat, juga diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat melalui Kementerian Agama dan pemerintah daerah.”

Kementerian Agama melalui berbagai bentuk program dan kegiatan, salah satunya adalah memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadat dan ormas-ormas keagamaan. Pemberian bantuan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama di masyarakat. Bantuan dimaksud bila dilihat dari jumlah nominal tidak banyak menolong dan mengatasi kebutuhan mereka penerima bantuan. Akan tetapi, dari segi tanggung jawab, perlindungan, pengayoman, dan layanan terhadap kehidupan beragama di Indonesia sangatlah bermakna.

Program bantuan oleh Kementerian Agama itu memiliki makna strategis di samping sebagai pengembangan manajemen rumah ibadat dalam mengelola rumah ibadat, juga untuk menunjang peran sosial rumah ibadat dalam pemberdayaan masyarakat. Namun demikian mengingat besarnya jumlah rumah ibadat maka bantuan tersebut tidak dapat menjangkau seluruh rumah ibadat yang ada. Berdasarkan data statistik hasil sensus jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 dan data jumlah rumah ibadat tahun 2011 oleh PIKMAS Kemenag, diketahui jumlah penduduk dan rumah ibadat adalah sebagai berikut:²

- Umat Islam 207.176.162, jumlah masjid 239.497.³
- Umat Kristen 16.528.513, jumlah gereja 60.170.
- Umat Katolik 6.907.873, jumlah gereja 11.021.
- Umat Hindu 4.012.116, jumlah pura 24.837.
- Umat Budha 1.703.254, jumlah vihara 2.354.

² Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama

³ Jumlah ini sudah mengalami perubahan, jumlah masjid pada tahun 2012 adalah 288.117 masjid, sumber Bimas Islam dalam Angka 2012.

- Umat Konghucu 117.091, jumlah kelenteng 552.

Berdasarkan uraian di atas, ada sejumlah masalah yang dapat diajukan, yaitu *pertama*, sejumlah bantuan yang diberikan seringkali tidak proporsional antara kebutuhan riil dengan besarnya bantuan. *Kedua*, ada asumsi bahwa bantuan yang diberikan mengalir kepada kelompok-kelompok tertentu yang berasosiasi dengan oknum tertentu. *Ketiga*, bantuan rumah ibadat yang biasanya berbentuk uang selalu dikaitkan dengan bantuan pembangunan fisik sehingga dalam tingkat tertentu justru bantuan tidak menciptakan kesejahteraan umat, dan *keempat*, rumah ibadat memiliki potensi yang besar khususnya terkait modal sosial, namun umumnya belum secara optimal bisa dimanfaatkan dengan baik.

Untuk menggali informasi dan permasalahan dalam pengelolaan rumah ibadat Hindu (pura) terkait pola manajemen dan perannya dalam pemberdayaan umat beragama, baik di bidang keagamaan maupun sosial kemasyarakatan, serta untuk melihat sejauhmana efektivitas bantuan yang diberikan Kementerian Agama dan pihak lain terhadap rumah-rumah ibadat, maka penting untuk dilakukan kajian tentang “Model-Model Pemberdayaan Rumah Ibadat di Berbagai Agama”.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana model pengelolaan rumah ibadat dalam memberikan pelayanan di bidang keagamaan dan pemberdayaan umat beragama?
2. Bagaimana pengurus rumah ibadat dalam mengoptimalisasikan modal sosial yang ada?
3. Bagaimana mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), dan pengawasan terhadap dana bantuan yang diterima?
4. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong dan penghambat pengelolaan rumah ibadat dalam pelayanan di bidang keagamaan dan pemberdayaan umat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui model-model pengelolaan rumah ibadat dalam memberikan pelayanan di bidang keagamaan dan pemberdayaan umat beragama;

2. Mengetahui upaya rumah ibadat dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada;
3. Mengetahui mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), pengawasan terhadap dana bantuan yang diterima.
4. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan rumah ibadat dalam pelayanan di bidang keagamaan dan pemberdayaan umat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat/kegunaan penelitian ini secara praktis adalah:

1. Bahan masukan bagi seluruh unit eselon I (masing-masing Ditjen Bimas) di lingkungan Kementerian Agama RI dalam merumuskan kebijakan pembimbingan dan mendorong pembinaan rumah ibadat di masing-masing agama serta instansi lainnya yang terkait dengan rumah ibadat, dalam memberdayakan umat beragama ke arah yang lebih baik dan profesional;
2. Referensi bagi akademisi, para pakar dan pemerhati lembaga sosial keagamaan dan rumah ibadat sebagai bahan kajian lebih lanjut.
3. Basis bagi penyusunan kebijakan tentang model-model pemberdayaan rumah ibadat.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait peran rumah ibadat dalam pemberdayaan umat telah beberapa kali dilakukan, antara lain: *Pertama*, penelitian “Pemberdayaan Umat melalui Pengembangan Manajemen Masjid”. Tahun 2008. oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Penelitian dilakukan di beberapa masjid antara lain; Masjid Raya Makassar Sulsel, Masjid Ar-Rahman Kampung Melayu Banjarmasin Tengah Kalsel, Masjid Al-Muhajirin Kec. Jelutung Kota Jambi, Masjid Agung dan Masjid Al-Mahmudiyah di Palembang, Masjid Ar-Rahmah Sweta Cakranegara Mataram, Masjid At-Taqwa Kec. Palmerah Jakbar, Masjid Al Bashor Kec. Kramat Jati Jaktim, Masjid Raya Pondok Indah Jaksel, dan Masjid Raya Islamic Center Jakut. Penelitian ini berusaha memotret perkembangan pengelolaan masjid, terutama berkenaan dengan berbagai upaya pemberdayaan umat.

Kedua, Penelitian “Bantuan Sosial Kementerian Agama RI bagi rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan di Indonesia,” Tahun 2010. oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Penelitian dilakukan di

beberapa daerah yaitu Aceh, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, dan NTT. Penelitian ini difokuskan pada bantuan sosial oleh Kementerian Agama terhadap rumah-rumah ibadat dan ormas keagamaan, dalam penelitian diketahui bahwa secara umum dampak sosial dari bantuan sosial keagamaan tersebut masih kurang nampak, dana bantuan umumnya dimanfaatkan untuk rehabilitasi rumah ibadat.

Ketiga, Penelitian “Peran Lembaga Pengelola dan Asset Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Umat Beraga di Berbagai Daerah”. Tahun 2011, oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, penelitian ini mengkaji efektivitas pengelolaan dana dan asset umat yang diberikan kepada sejumlah lembaga sosial termasuk rumah ibadat.

Penelitian kali ini akan berusaha mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara lebih jelas pola manajemen atau pengelolaan rumah-rumah ibadat dalam melakukan pelayanan keagamaan dan pemberdayaan umat. Sekilas ada persamaan dengan kajian yang pertama, namun demikian terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian yang pertama hanya mengkaji rumah ibadat milik umat Islam saja yaitu masjid, sedangkan dalam penelitian ini juga akan mengkaji rumah ibadat umat agama lain.

Sedangkan jika dibandingkan dengan penelitian yang kedua dan ketiga, terdapat beberapa perbedaan, *pertama*, kedua penelitian tersebut mengkaji aspek aspek bantuan dana terhadap rumah ibadat oleh pemerintah, sedangkan aspek manajemen rumah ibadat tidak menjadi fokus kajian. Dalam penelitian kali ini aspek bantuan dana terhadap rumah ibadat oleh pemerintah hanya salah satu bagian dari aspek yang dikaji. *Kedua*, aspek yang dikaji tidak hanya *out come* yaitu pemberdayaan umat, melainkan juga *input* atau sumber daya yang dimiliki rumah ibadat, juga proses yaitu aspek pengelolaan rumah ibadat oleh masing-masing pengurusnya.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pencarian data, dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan dan *key person*. Informan dipilih berdasarkan kualitas dan tidak menekankan aspek kuantitas, yaitu berasal dari pengurus rumah ibadat dari berbagai agama (sesuai unit analisisnya), dan beberapa anggota masyarakat serta tokoh agama yang memahami persoalan pengelolaan rumah ibadat di wilayahnya. Sebelum penggalian data primer melalui pelaksanaan wawancara dilakukan penggalian data sekunder sebagai

bahan/informasi awal terkait rumah ibadat yang diperoleh dari sumber-sumber resmi yang dianggap relevan dengan objek dan tema penelitian.

Lamanya waktu penelitian/penggalian data di lapangan adalah 15 hari. Adapun lokasi penelitian adalah di 8 provinsi, di setiap provinsi tersebut dilakukan penelitian terhadap dua rumah ibadat satu agama, yaitu rumah ibadat tingkat Kabupate/Kota dan rumah ibadat tingkat desa/kelurahan yang dikelola masyarakat. Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam maka penggalian data hanya difokuskan di dua rumah ibadat saja dalam satu lokasi Kabuapten/kota.

Langkah selanjutnya, setelah penggalian data, dilakukan pemilihan atau reduksi data, pengelompokkan, dan ketegorisasi data, dengan jalan abstraksi yang merupakan upaya memuat rangkuman inti, proses dan pernyataan. Selanjutnya dilakukan analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, Sebagai tahap akhir sebelum kesimpulan dilakukan interpretasi data yaitu mencoba untuk memaknai, mendiskusikan, membandingkan, mencocokkan, dengan teori yang ada.

H. Kerangka Teori

3. Modal Sosial

Dilihat dari sejarahnya, kemunculan dan berdirinya rumah ibadat di Indonesia adalah bersamaan dengan muncul dan berkembangnya agama-agama itu sendiri. Rumah ibadat dalam sejarahnya berfungsi tidak hanya sebagai rumah ibadat saja, melainkan juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan (pembinaan) keagamaan dan penyebaran masing-masing agama.

Dalam RPJMN Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama dinyatakan, bahwa negara memberikan fasilitas dan pelayanan pemenuhan hak dasar pada setiap warga negara, ini berarti negara turut memberikan fasilitas terhadap rumah-rumah ibadat sebagai tempat ibadat dan pembinaan keagamaan masyarakat. Namun demikian karena banyaknya jumlah rumah ibadat yang ada, maka fasilitas, pelayanan, dan bantuan yang diberikan pemerintah bagi rumah-rumah ibadat tidak dapat menjangkau seluruh rumah ibadat yang ada. Untuk itu selama ini rumah-rumah ibadat lebih banyak dikelola secara mandiri oleh masyarakat, akibatnya model pengelolaan dan tipologi rumah ibadat juga menjadi sangat beragam.

Rumah-rumah ibadat umumnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat untuk keperluan bersama sebagai bagian integral dari dorongan keyakinan

keagamaan. Peningkatan rumah ibadat dari segi kuantitas perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pengelolaan rumah ibadat dalam menjalankan fungsinya, baik dalam memberikan pelayanan ibadat maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti luas. Untuk itu penting bagaimana menggalang dan menggerakkan modal sosial dan segenap potensi yang dimiliki masjid menjadi kekuatan yang berkembang secara simultan dan timbal balik, rumah ibadat makmur, umat sejahtera. Sebaliknya umat sejahtera rumah ibadat makmur.

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, diperlukan kerjasama dan kebersamaan yang baik dari segenap anggota masyarakat. Konsep modal sosial (*sosial capital*) dalam *mainstream* ilmu sosial pertama kali diusung oleh Hanifan (1916), Kemudian konsep tersebut semakin dipopulerkan oleh Coleman (1988). Putnam (1993,1995, 1999), Fukuyama (1995) dan ilmuwan sosial lainnya.

Menurut pencetusnya, Lyda Judson Hanifan, modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi mengandung arti kiasan, namun merupakan modal nyata yang penting dalam kehidupan. Contoh modal sosial menurut Hanifan dapat berupa kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.

Sedangkan Putnam (1993) menyatakan bahwa modal sosial merupakan unsur utama pembangunan masyarakat madani (*civil community*). Modal sosial tersebut mengacu pada aspek-aspek utama organisasi sosial seperti kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaring-jaringan (*networks*) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitasi tindakan yang terkordinasi (Putnam. 1993:167).

Sementara Fukuyama (1995) menyebutkan adanya keunggulan modal sosial dibanding modal material atau modal ekonomi, modal sosial justru semakin bertambah apabila semakin dikelola dan dipergunakan dengan baik. Penggunaan modal sosial akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan suatu kegiatan pembangunan secara umum. Fukuyama juga menyatakan, kepercayaan (*trust*) muncul jika di masyarakat itu terdapat nilai (*shared values*) sebagai dasar dari kehidupan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Dengan kepercayaan, orang tidak akan mudah curiga yang sering menjadi penghambat.

Di samping itu, jaringan (*networks*) memiliki dampak yang sangat positif dalam usaha peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lokal (Fukuyama, 1995:125). Sedangkan Halpem (2005:12) secara eksplisit menyatakan bahwa modal sosial itu meliputi *networks*, norma dan sanksi. Modal sosial antara komunitas yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan.

Pengertian yang hampir serupa dikemukakan oleh Piere Bourdieu. Ia mendefinisikan modal sosial adalah keseluruhan sumber daya baik aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Menurut Bourdieu ada empat tipe modal, yakni *modal ekonomi* yakni kemampuan finansial yang dimiliki agen, misalnya keuangan, harta, kekayaan, komoditas-komoditas dan sumber-sumber daya dalam bentuk, salah satunya tanah. *Modal kultural* meliputi pelbagai pengetahuan sah yang dimiliki agen. *Modal sosial* adalah jaringan sosial yang bernilai antarindividu. *Modal simbolik* berasal dari kehormatan dan prestise (Mahin, 2009; juga Haryatmoko, 2010).

Dari beberapa teori modal sosial yang telah dikemukakan para ahli di atas, dapat diambil pengertian tentang modal sosial yang relevan dengan tujuan penelitian ini yaitu potensi fisik atau material dan spiritual yang dimiliki suatu komunitas rumah ibadat yang apabila dibangun dan ditumbuhkembangkan secara baik merupakan kekuatan yang strategis untuk mengembangkan rumah ibadat sehingga mampu menjalankan perannya di masyarakat secara maksimal.

Dengan memahami modal sosial sebagaimana tersebut di atas, maka dalam pengurusan rumah ibadat terdapat modal sosial yang potensial. Modal sosial itu muncul dari adanya interaksi antara jamaah dan lingkungan komunitas rumah ibadat. Relasi intim yang terbangun antara jamaah akan melahirkan ikatan emosional sebagai sesama jamaat rumah ibadat.

Besarnya modal sosial yang diperoleh oleh seseorang atau suatu lembaga seperti rumah ibadat, tergantung pada seberapa besar kuantitas maupun kualitas jaringan yang diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi, budaya dan sosial. Dengan demikian, seperti halnya modal ekonomi, modal sosial juga bisa bersifat produktif dan tidak produktif.

Dari uraian di atas, modal sosial memiliki beberapa elemen pokok yang mencakup, (1) kepercayaan (*trust*) yaitu meliputi kejujuran, keadilan, sikap

egaliter, toleran, keramahan, dan saling menghormati, (2) Jaring sosial (*social networks*) yaitu meliputi partisipasi, resiprositas (timbang-balik), solidaritas, dan kerjasama, dan (3) pranata (*institutions*) yaitu meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama, norma, sanksi, serta aturan-aturan. Ketiga elemen tersebut tidak bersifat *given*, untuk itu perlu diciptakan, dikembangkan, dan didayagunakan melalui mekanisme sosial budaya dalam suatu unit sosial. Untuk itu ada tiga parameter untuk mengukur apakah rumah ibadat memiliki modal sosial yang kuat atau lemah, yaitu, *pertama*, adanya kepercayaan antar sesama jamaah maupun jamaah terhadap pengurus rumah ibadat. *Kedua*, sejauhmana jaringan kerjasama antara komunitas sosial keagamaan tertentu dengan rumah ibadat. *Ketiga*, sejauhmana nilai-nilai dan norma yang terdapat dalam agama diyakini dan dijalankan bersama oleh jamaah rumah ibadat, jika nilai dan norma tersebut secara kolektif dijalankan maka akan dapat berperan dan berfungsi bagi kemajuan rumah ibadat.

4. Total Quality Management (TQM)

Manajemen berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif menangani suatu urusan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Manajemen juga adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan daripada benda dan tenaga manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan lebih dahulu.

Berkenaan dengan rumah ibadat, selain dikelola dengan manajemen yang baik, rumah ibadat juga perlu dikelola berdasarkan suatu kepemimpinan yang handal. Kepemimpinan adalah perihal memimpin yang merupakan suatu seni tata cara atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain kemampuan mempengaruhi, menuntun, dan membimbing seseorang atau kelompok dan mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan organisasi tersebut. Pada dasarnya manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam prosesnya mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam dinamika kehidupan modern, sebagian rumah ibadat itu sudah dikelola dengan manajemen dan kepemimpinan modern. Salah satu teori manajemen yang banyak

dikembangkan dalam era modern ini adalah *Total Quality Management* atau TQM.

TQM pada dasarnya merupakan suatu usaha yang digunakan dalam proses perbaikan guna mencapai suatu hasil yang baik, khususnya dalam mutu atau kualitas dari suatu produk. Dalam sejarahnya, TQM lahir di Amerika pada tahun delapan puluhan. Konsep manajemen ini dikalangan Angkatan Laut Amerika disebut *Total Quality Leadership*. Sedangkan di Jepang disebut *Total Quality Control* (TQC) dan di Singapura disebut *Total Quality Process* (TQP). Sedangkan di Indonesia sendiri dikenal dengan nama Pengendalian Mutu Terpadu (PMT).

TQM mengacu pada metode manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam organisasi bisnis. TQM adalah pendekatan manajemen yang komprehensif yang bekerja horizontal di seluruh organisasi, yang melibatkan semua departemen dan karyawan, dan memperluas baik ke "belakang" maupun ke "depan", termasuk bagi para pemasok dan klien.⁴ TQM menyediakan kerangka-kerangka kerja untuk menerapkan produktivitas yang lebih berkualitas dan inovatif secara efektif yang dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing organisasi. TQM diterapkan bukan hanya pada industri manufaktur, tetapi juga pada industri jasa. Industri jasa atau non barang ini mulai diterapkan seperti pada Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain sebagainya. TQM dapat dipergunakan oleh lembaga usaha yang berorientasi profit (keuntungan) seperti perusahaan atau lembaga nirlaba (non-profit).

Sejarah lahirnya TQM diawali dari Ellias Whitney yang memperkenalkan "pengendalian mutu" pada awal abad 19, dalam bentuk pengecekan barang yang akan dikirim kepelanggan dengan cara memisahkan barang cacat untuk kepuasan konsumen. Pendekatan ini dikenal dengan pengendali mutu klasik. Tahun 1924, Dr. Walter Shewhart memperkenalkan "bagan kendali control (*controlchart*)" yang bermanfaat untuk mengetahui apakah mutuproduk yang dihasilkan berada pada batas yang dikehendaki, sehingga inspeksi dilakukan hanya pada sampel

⁴ TQM hanya salah satu dari banyak akronim yang digunakan untuk menamai sebuah sistem manajemen yang berfokus pada mutu. Akronim lainnya termasuk CQI (*Continuous Quality Improvement/Peningkatan Mutu Berkelanjutan*), SQC (*Statistical Quality Control/Pengendalian Kualitas Statistik*), QFD (*Quality Function Deployment*), QIDW (*Quality in Daily Work/Kualitas dalam Pekerjaan Sehari-Hari*), TQC (*Total Quality Control/Pengendalian Mutu Total*), dan lain-lain.

barang dan dapat mengurangi biaya. Fungsi pengendalian mutu ini mulai dikembangkan dalam berbagai perusahaan.

Pada 1950, Dr. W. Edward Deming memperkenalkan konsep “pengendalian mutu menyeluruh dalam perusahaan”. Deming menekankan pentingnya statistik control dalam proses produksi dan perbaikan mutu produksi. Deming memberikan kontribusi dengan teori “14 Butir Untuk Manajemen”. Deming dan Schewart mengembangkan konsep siklus “PDCA (*plan-do-check-action*).” “*Plan*” meliputi identifikasi masalah, memperoleh data, dan mengembangkan rekomendasi. “*Do*” meliputi penerapan solusi berbagai percobaan. “*Check*” berupa pengamatan setelah penerapan untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh sesuai rencana. “*Act*” melibatkan kegiatan perubahan permanen jika hasilnya efektif bagi peningkatan atau kembali pada kondisi sebelumnya jika penerapannya bermasalah.

Pada 1961, Dr. AV Feigenbaum memperkenalkan konsep “*make it right at the first time*”. Konsep ini akan berkembang dan menjadi salah satu dasar TQM. Pada 1979, Phillips B. Crosby menekankan “pentingnya pimpinan puncak” untuk menciptakan iklim kerja yang nyaman dan meyakinkan bahwa mutu adalah misi pokok yang harus dicapai oleh organisasi. Dan bahwa karyawan di semua tingkatan dapat dimotivasi untuk mengejar peningkatan tetapi motivasi tersebut tidak akan berhasil kecuali disediakan alat untuk meningkatkannya. Pada tahun 1987, lahirlah suatu standar tentang sistem manajemen mutu yaitu ISO 9000, *Quality Management System*.

Dari uraian tersebut, prinsip dan unsur pokok dalam TQM dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan merupakan sasaran utama yang harus dicapai, karena dalam TQM konsep kualitas suatu produk tidak lagi tergantung kepada kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi kualitas sebuah produk itu ditentukan oleh pelanggan.
- 2) Respek terhadap setiap orang, karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Karena itu setiap orang dalam perusahaan diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terikat dan berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan.
- 3) Manajemen berdasarkan fakta, dalam hal ini setiap keputusan selalu didasarkan pada data bukan sekedar pada perasaan.

4) Perbaikan berkesinambungan, untuk mencapai kesuksesan tersebut perlu melakukan proses perbaikan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam proses ini dipakailah siklus PDCA (*Plan-Do-Chek-Act*) yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan hasil dan tindakan korektif terhadap hasil yang sudah diperoleh.

TQM kemudian banyak dikembangkan oleh para ahli manajemen, salah satunya adalah Malcolm Baldrige Quality Award (MBQA). MBQA merupakan “award” yang dimulai sejak 1988, dan ditujukan untuk meningkatkan TQM perusahaan-perusahaan Amerika, menggunakan nama Malcolm Baldrige, Menteri Perdagangan Amerika dari 1981 sampai meninggalnya secara tragis dalam kecelakaan “rodeo” tahun 1987, yang dipandang telah memberikan kontribusi bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi jangka panjang pemerintah.

Kriteria Baldrige pada awalnya menggunakan TQM, seperti “kualitas pelatihan”, “kualitas perencanaan”, kualitas team” dan seterusnya. Namun belajar dari pengalaman, kata “*quality*” akhirnya tidak digunakan lagi dalam menetapkan kriteria, dan sejak 1995 diganti dengan kata “*performance*” yang memberikan tekanan kualitas pada keseimbangan semua aspek organisasi sebagai sebuah sistem, bukan hanya menekankan pada produk atau jasa yang bebas dari cacat, dan pada kepuasan konsumen saja seperti pada TQM.⁵

⁵ Diadaptasi dari Mark Graham Brown: *Baldrige Award Winning Quality, How to Interpret the Baldrige Criteria for Performance Excellence* (New York, CRC Press, 17th Edition, 2008).

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

D. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kota Denpasar adalah ibukota Provinsi Bali setingkat kabupaten dan menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian dan pendidikan. Menurut letak geografisnya, kota Denpasar berada antara 08° 35' 31'' - 8° 44' 49'' lintang Selatan dan 115° 10' 23'' - 115° 16' 27'' bujur Timur.⁶ Sedangkan berdasarkan letaknya, kota Denpasar berbatasan langsung dengan kabupaten Badung, kabupaten Gianyar dan Selat Lombok.

Luas wilayah kota Denpasar adalah 12,78 km² atau 2,18% dari luas provinsi Bali dengan jumlah penduduk berdasarkan data 2011 sebanyak 804.905 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 413.335 (48,65% dari jumlah penduduk) dan perempuan sebanyak 391.570 jiwa (48,65% dari jumlah penduduk).⁷ Kota Denpasar berada pada lokasi dan aksesibilitas yang baik sebagai faktor penetapan kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali.

Dengan posisinya seperti di atas, Denpasar mengemban peran ganda dan multi fungsi, sekaligus memiliki dinamika terhadap keterbukaan, pluralistik dan kompleks sebagai barometer Bali dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi ini telah berdampak langsung terhadap pertumbuhan kota dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang signifikan. Secara administratif, pemerintahan kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan dan 43 desa/kelurahan.

Hindu adalah agama mayoritas yang dianut penduduk Denpasar. Hampir tiap hari ditemukan perayaan hari suci keagamaan. Hal ini karena dalam agama Hindu dikenal hari-hari suci yang dilaksanakan berdasarkan *wewaran*, *pawukon* dan *sasih*.⁸ Perayaan hari suci juga dilaksanakan karena *piodalan*⁹ sebuah tempat suci. Pemandangan ini menjadi daya tarik wisata budaya yang dinikmati oleh para wisatawan, baik domestik maupun asing, sehingga sering agama Hindu dan budaya

⁶ BPS 2012 dalam Profil Kementerian Agama Kota Denpasar, 2013:2

⁷ *Ibid*

⁸ Perayaan hari suci agama dalam Hindu didasarkan atas perhitungan *wewaran*, seperti kajeng kliwon, *pawukon*, seperti Galungan, Kuningan, Saraswati, Tumpek, dll., dan *sasih*, seperti *Nyepi* dan *Siwaratri*

⁹ *Piodalan* sering juga disebut *rerahinan* atau *pujawali* adalah peringatan *tegak ngenteg linggih* sebuah pura. Untuk memahami secara sederhana, dalam bahasa Indonesia, *piodalan* sering dipadankan seperti hari ulang tahun, meski masih tidak sepenuhnya tepat seperti itu.

dianggap menyatu dan susah untuk dibedakan.¹⁰ Semaraknya perayaan hari suci Hindu tidak luput dari amatan para ahli, terutama antropolog,¹¹ juga oleh kalangan intelektual dan akademisi.

Denpasar sebagai penggerak denyut nadi ibukota provinsi juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama dengan merasuknya modernisasi yang membawa serta perubahan yang berdampak pada dimensi kehidupan alamiah maupun sosial-budaya. Denpasar tampak menjadi kota yang terbuka. Namun satu hal yang menggembirakan, dampak perubahan tidak menggoyahkan kerukunan antaragama yang telah lama terbangun,¹² dan ini menjadi modal sosial berharga bagi Denpasar untuk menawarkan rasa aman kepada siapapun yang datang. Untuk mengenal lebih detail tentang Denpasar, dapat dibaca melalui data-data berikut ini.

Data Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
1	2	3	4	5
1	Denpasar Selatan	49,99	222.315	4.447
2	Denpasar Timur	22,31	152.054	6.815
3	Denpasar Barat	24,06	242.622	10.084
4	Denpasar Utara	31,42	187.914	5.981
Jumlah		127,78	804.905	27.327

Sumber: BPS Kota Denpasar (dalam Profil Kementerian Agama Kota Denpasar, 2013:2)

¹⁰ Michel Picard menggambarkan suasana keagamaan di Bali seperti ini dalam *Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata* (2006) sebagai atraksi dan karnaval budaya yang tidak pernah mati dalam kehidupan masyarakat Bali. Hal ini sudah sangat lama berlangsung, bahkan sejak kedatangan wisawatan pertama, George Kreus ke Bali dan memublikasikannya ke dalam Majalah BALI.

¹¹ Penelitian tentang Bali dan agama Hindu telah sejak lama dilakukan para orientalis, sebut saja Gregory Bateson; Jean Belo; James A. Boon; M. Covarrubias, dll.

¹² Selepas publikasi massif tersebut, Bali menjadi sangat terbuka terhadap dunia luar. Kajian ini dijelaskan dengan baik oleh Henk Schulte Nordholt (2010) dalam *Bali Benteng Terbuka 1995-2005*. Menurutnya, keterbukaan seperti ini memiliki ragam dampak hingga hari ini, sekarang sangat tergantung dari bagaimana orang Bali kini menghadapinya.

Data Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Desa		Banjar	
			Dinas/Kelurahan		Dinas	Adat
1	2	3	4	5	6	7
1	Denpasar Selatan	Kelurahan Sesetan	10	11	105	90
2	Denpasar Timur	Kelurahan Kesiman	11	12	87	97
3	Denpasar Barat	Kelurahan Padangsambian	11	2	112	106
4	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja	11	10	102	99
Jumlah			43	35	406	392

Sumber: BPS Kota Denpasar (dalam Profil Kementerian Agama Kota Denpasar, 2013:4)

E. Kehidupan Keagamaan Umat Hindu di Kota Denpasar

Sebagaimana telah disinggung di atas, agama Hindu telah “melembaga” dalam kehidupan dan kebudayaan Bali serta menjadikan nilai-nilai ajaran Hindu sebagai pondasi yang kokoh. Nilai-nilai tersebut teraktualisasi sekaligus menginternalisasi ke dalam berbagai aktivitas termasuk filosofi dan pandangan hidup masyarakat Bali melalui seni-budaya, adat-istiadat, hukum adat, tata ruang, tata bangunan, organisasi sosial kemasyarakatan tradisional, hingga ke sistem pengaturan hidup bersama dalam komunitas. Aspek-aspek budaya ini merupakan mosaik kebudayaan Bali dewasa ini.¹³

Kitab suci agama Hindu adalah Veda yang segala isinya diyakini dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Veda merupakan ilmu pengetahuan suci yang berasal dari Ida Sanghyang Widhi Wasa dan disabdakan kepada para Maharsi sebagai sruti dan dituliskan dengan bahasa Sanskerta kuno (*daivi vak*). Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan untuk memahami kitab Sruti, Veda dituliskan kembali oleh para Maharsi berdasarkan ingatan menjadi kitab Veda Smrti. Kitab ini menjadi penting bagi umat Hindu karena dapat menjadi kitab untuk memahami keluasan dan kedalaman isi Veda.

Adapun tujuan utama yang menjadi penuntun setiap kata, pikiran dan perbuatan bagi setiap umat Hindu dalam menjalankan kehidupannya adalah *Mokshartham Jagathita ya ca iti Dharma*. Kemanunggalan *atman* dan *paramatma* dapat dicapai

¹³ Wiana dan Raka Santeri (1993: 3-11)

melalui berbagai macam cara, di antaranya *Catur Marga*, *Catur Asrama* dan *Catur Purusharta*.¹⁴

Dalam hal ketuhanan, berbeda dengan agama-agama Abrahamik yang memandang bahwa “kebenaran” hanya ada satu dan jika ada bentuk lain dari “kebenaran” tersebut sering dianggap sesat. Bahkan dalam ajaran Hindu diyakini Tuhan berwajah dan bernama banyak seperti yang diinginkan umatnya.¹⁵ Tuhan menjadi *personal God* sekaligus *impersonal God*, Tuhan berada dalam ciptaanNya sekaligus pada saat saat bersamaan berada di luar ciptaanNya.

Untuk memahami filsafat tersebut, Sang Hyang Widhi melalui Veda dan susastera Veda menyabdakanya sesuai dengan tingkat spiritualitas umatnya. Catur Marga dan Catur Asrama menjadi jalan yang berbeda-beda untuk memahami ajaran Veda. Karena itulah ajaran Veda tersusun atas banyak cabang filsafat dengan berbagai “wajahnya” yang mempertegas bahwa terdapat keluwesan ajaran Veda yang dapat tumbuh dan berkembang di mana saja sesuai lokalitas. Falsafah yang sering digunakan umat Hindu untuk tumbuh dan berkembang di manapun berada adalah *desa mawacara* atau *desa, kala, patra*.¹⁶

Dengan fleksibelitas ini, ajaran Hindu dapat hidup sepanjang jaman dan abadi (*sanathana dharma*). Tidaklah mengherankan jika ditemukan banyak perbedaan wajah umat Hindu disemua wilayah atau daerah, namun hanya dipermukaan saja, tidak pada isi atau substansi. Perbedaan pada kulit permukaan ini dapat ditemukan antara agama Hindu di India, Indonesia, Bali bahkan di Denpasar sendiri yang dihidupi oleh berbagai umat dari kabupaten lainnya yang turut serta membawa adat

¹⁴ *Catur Marga* adalah empat jalan berbeda untuk memuja Tuhan dan menjalankan ajaran agama yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing umat Hindu, yakni melalui jalan bhakti yang tulus (*Bhakti Marga*), melalui jalan perbuatan yang total (*Karma Marga*), melalui jalan pengetahuan (*Jnana Marga*) dan melalui jalan spiritual dan kebebasan dari keterikatan dunia (*Raja Marga*); *Catur Asrama* adalah empat tingkatan hidup manusia yang berstruktur mulai dari *Brahmacari* yaitu masa menuntut ilmu pengetahuan, *Grahashta* yaitu masa berumah tangga, *Wanaprasta* yaitu masa mengurangi kehidupan duniawi dan memikirkan kehidupan rohani, dan *Bhiksuka* atau *Sanyasin* yaitu masa menjalani kehidupan rohani secara total; *Catur Purusharta* adalah empat tujuan hidup yang harus diraih oleh umat Hindu, yaitu *Dharma*, *Artha*, *Kama* dan *Moksa*. *Catur Purusartha* dapat diraih dengan menjalankan secara proporsional *Catur Marga* dan *Catur Asrama*

¹⁵ *Sahasra rupa* artinya seribu rupa atau wajah dan *sahasra nama* artinya seribu nama. Kedua istilah ini hanya untuk menggambarkan begitu banyak nama dan rupa yang bisa dibayangkan untuk Tuhan yang esa, tunggal. Dalam kitab suci Veda, cara memahami Tuhan seperti ini adalah pengejawantahan dari bunyi mantram: *ekam sat viprah bahuda vadanti* (Tuhan itu satu adanya, orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama)

¹⁶ Istilah ini untuk menunjukkan fleksibelitas Hindu di manapun berada harus menghormati kearifan lokal sebagai sebuah kekayaan lokalitas yang harus dihormati dan digunakan untuk tumbuh dan berkembang, bukan ditiadakan dengan memaksa budaya baru yang dibawa. *Desa mawacara* adalah adat dan norma yang berlaku disebuah daerah atau tempat. Sedangkan *desa, kala, patra* disederhanakan artinya dengan tempat, waktu dan keadaan.

istiadat daerahnya masing-masing. Analog yang cukup sederhana dapat menggambarkan situasi ini adalah seperti sebutir telur ayam kampung, ayam negeri, ayam hutan, dll. Kulit telur, bentuk, warna, ukuran boleh berbeda berbeda, namun jika diambil isi dalamnya tetap sama. Dengan demikian tampilan agama Hindu diseluruh dunia bisa berbeda-beda.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan jaman, ajaran Hindu juga ikut mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Situasi ini mau tidak mau diikuti agar Hindu tetap dapat mempertahankan diri tanpa mengorbankan nilai-nilai adiluhung yang telah diwariskan. Misalnya, Hindu di Bali, khususnya Denpasar kini menghadapi beragam persoalan baik secara internal maupun eksternal. Masalah internal yang masih dihadapi adalah *pertama*, berkembangnya beberapa paham yang datang dari luar Bali, seperti aliran kepercayaan. Saat ini permasalahan ini menjadi problematik. *Kedua*, perbedaan persepsi dalam memahami dan melaksanakan tiga kerangka dasar agama Hindu, yakni susila, ritual dan tattwa. *Ketiga*, dualisme kepengurusan majelis umat Hindu.

Sedangkan masalah eksternal yang paling utama dihadapi umat Hindu di Denpasar adalah *pertama*, masalah pesatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk, terutama dari para pekerja atau kaum migran yang datang dari luar Bali. Meski situasi ini tidak bisa dihindari, namun terdapat dampak sosial dan budaya termasuk agama yang ikut mewarnai kehidupan umat Hindu di Denpasar. *Kedua*, laju globalisasi dan modernisasi dengan filter yang masih minimal. Kunjungan wisatawan dan terbukanya Denpasar sebagai tempat investasi bagi pemilik modal, di samping berdampak positif, tentu akan berdampak negatif jika tidak diantisipasi.¹⁷

Namun sampai saat ini, kehidupan keagamaan umat Hindu di Denpasar masih sangat baik. Hal ini bisa terjadi karena peran desa adat yang masih sangat kuat dalam mengawal kehidupan keagamaan. Berbagai permasalahan baik yang menyangkut administrasi dan kedinasan difasilitasi oleh desa dinas. Sedangkan masalah agama, adat dan budaya diselesaikan melalui *desa pakraman*. Sehingga jika diperhatikan, interkasi sosial antarpemeluk agama di Denpasar tidak lepas karena terdapat desa dinas sebagai ruang interaksi antaragama.

¹⁷ Permasalahan seperti ini mungkin tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama semata, namun peran-peran penyuluh agama menjadi sangat signifikan meskipun secara kuantitas masih belum memadai untuk semua agama. Berdasarkan data, Penyuluh PNS agama Hindu hanya 9 orang, Islam (2), Kristen (1), Katolik (1), bahkan Buddha dan Konghucu belum memiliki tenaga penyuluh.

Data Penduduk Kota Denpasar Berdasarkan Agama

No	Kecamatan	Hindu	Islam	Kristen	Katolik	Buddha	Kong- hucu	Junlah Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Denpasar Selatan	170.725	54.013	10.094	5.692	4.263	64	244.581
2	Denpasar Timur	96.637	31.107	3.371	5.427	1.845	16	138.403
3	Denpasar Barat	143.548	70.455	7.367	3.870	4.165	30	229.435
4	Denpasar Utara	127.256	39.470	4.440	2.260	2.431	43	175.900
Jumlah		538.166	195.045	12.704	25.272	17.249	153	788.589

Sumber: BPS Kota Denpasar (dalam Profil Kementerian Agama Kota Denpasar, 2013:17)

Data Tempat Peribadatan Umat Beragama di Kota Denpasar

Kec	Hindu					Islam				Konghucu		Buddha			Katolik				Kristen	
	Kahya- ngan	Kahya- ngan lainnya	Swagi- na	Kahya- ngan Jagat	Jml	Masjid	Lang- gar	Mo- shala	Jml	Klen- teng	Jml	Vihara	Cetya/ TITD	Jml	Kate- dral	Gereja	Kapel	Jml	Gereja	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Den Sel	33	18	21	-	74	8	-	26	34	-	-	2	-	2	1	2	-	3	21	21
Den Tim	36	1	24	-	61	4	-	23	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13
Den Bar	6	16	10	1	32	14	-	41	55	1	-	5	-	5	-	1	1	2	20	20
Den Ut	30	70	20	-	120	4	-	21	25	-	-	3	-	3	-	-	-	-	15	15
Jml	105	105	75	1	287	30	-	111	141	1	-	10	-	10	1	3	1	5	69	69

Sumber: Profil Kementerian Agama Kota Denpasar (2013:18)

Data Pemuka dan Tokoh Agama di Kota Denpasar

Kec	Hindu			Buddha					Kris- ten	Konghucu				Islam				Katolik			
	Suling- gih	Pemang- ku	Jml	Bhiksu	Pandi- ta	Upa- sak	Suma- ner	Jml	Pende- ta	Jiao Sheng	Wen Shi	Xue Shi	Jml	Ulama	Khotib	Muba- lig	Jml	Pastur	Bruder	Suster	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Den Sel	54	537	591	2	-	10	-	12	15	1	1	-	2	2	16	9	27	1	-	12	13
Den Tim	30	318	348	-	-	-	-	-	18	2	1	-	3	3	18	6	27	7	1	3	11
Den Bar	28	375	403	5	18	20	-	43	26	2	1	-	3	4	42	18	64	1	-	-	1
Den Ut	29	360	389	-	-	-	-	-	9	4	1	-	8	2	23	10	35	-	-	-	-
Jml	141	1590	1731	7	18	30	-	55	68	9	4	-	16	11	99	43	153	9	1	15	25

Sumber: Profil Kementerian Agama Kota Denpasar (2013:18)

F. Pura sebagai Tempat Suci Umat Hindu¹⁸

Dalam sistem pemujaan umat Hindu, terutama di Bali adalah pengejawantahan dari konsep *Tri Hita Karana*, yakni tidak hanya semata vertikal kepada Tuhan tetapi juga seimbang kepada sesama manusia dan alam lingkungan. Memuja Tuhan berarti pula menyediakan wadah harmoni kepada lingkungan sosial sehingga menjadi dinamis dan produktif. Artinya terdapat korelasi yang saling melengkapi dan seimbang dari hubungan baik vertikal (Tuhan) maupun horizontal (manusia dan alam).

Falsafah ini diterapkan secara eksplisit ke dalam sistem pemujaan di tempat suci yang didasarkan atas klasifikasi pura, fungsi pura dan kaitan pura dengan *Tri Hita Karana* serta dengan *Tri Mandala*. Sehingga jika ingin memahami bagaimana umat Hindu mengelola dan memberdayakan tempat ibadatnya, maka harus memahami pula klasifikasi tempat ibadat, fungsi pura dan peruntukannya. Misalnya, jika pemerintah hendak memberikan bantuan perbaikan tempat ibadat, maka di Bali akan sangat berkenaan dengan *pura* apa, siapa *pengemponnya*, fungsinya dan untuk masalah apa terkait *Tri Hita Karana* dan *Tri Mandala*. Berikut akan diuraikan beberapa hal yang dimaksud dengan semua ini.

1. Klasifikasi Pura

Pura di Bali dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yakni:

a. Pura Kawitan

Pura ini adalah tempat suci untuk memuja roh suci leluhur sebagai *Sang Hyang Atma*. Pura seperti ini didirikan oleh keluarga-keluarga Hindu dari keluarga inti (ayah, ibu dan anak) hingga keluarga besar atau dalam satu klan. Dalam setiap keluarga inti di Bali, pura yang didirikan untuk memuja roh suci leluhurnya adalah *sanggah kemulan* atau *merajan kemulan* yang letaknya di bagian hulu atau *kaja kangin* (Bhs Ind: arah timur laut) dari areal pekarangan rumah. Jika keluarga inti tersebut berkembang menjadi minimal 10 ikatan keluarga inti akan didirikan tempat suci sebagai pemujaan bersama yang disebut *merajan ibu perthiwi* atau *merajan agung*, dan jika berkembang menjadi setidaknya-tidaknya 20 pekarangan mereka mendirikan *Pura Batur*. Sedangkan jika ikatan keluarga berkembang menjadi lebih dari 40 pekarangan mereka mendirikan *Pura Dadia* atau *Pura Panti*.

¹⁸ Untuk sub bab ini, materi disarikan dari Wiana (2007).

b. *Pura Kahyangan Desa*

Pura ini adalah tempat pemujaan bagi umat Hindu yang berdomisili dalam satu wilayah teritorial *desa pakraman*. Umumnya setiap *desa pakraman* memiliki tiga buah pura yang disebut *Kahyangan Tiga*, yang terdiri dari *Pura Desa*, *Pura Puseh* dan *Pura Dalem*. *Kahyangan Tiga* memiliki tiga fungsi, yakni *pertama*, menjadi wadah untuk membina kerukunan hidup dalam satu wilayah teritorial *desa pakraman*. *Kedua*, sebagai tempat memuja Tuhan untuk memohon tuntunan hidup melalui pemujaan kepada *Dewa Brahma* sebagai pencipta di *Pura Desa*, *Desa Wisnu* sebagai pemelihara di *Pura Puseh* dan *Dewa Siwa* sebagai pemralina atau pengembali semua yang ada kepada asal mulanya di *Pura Dalem*. *Ketiga*, mengendalikan tiga sifat dasar manusia yang disebut *Tri Guna*, yaitu sifat *tamas*, *rajas* dan *satwam* dalam keadaan yang seimbang.

c. *Pura Kahyangan Swagina*

Pura ini adalah tempat memuja Tuhan bagi mereka yang memiliki kesamaan profesi, pekerjaan maupun fungsinya. Misalnya, para petani di Bali akan mendirikan *Pura Subak* atau juga dikenal *Pura Bedugul*, *Pura Ulun Danu* dan *Pura Ulun Suwi* yang didirikan di tengah-tengah sawah. Di pura ini para petani memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai *Dewi Sri* karena diyakini sebagai sumber kemakmuran pertanian. Begitu juga halnya dengan profesi lainnya, seperti para pedagang atau yang bergerak di dunia usaha perdagangan dan ekonomi akan mendirikan *Pura Melanting* di tengah-tengah pasar, yakni tempat memuja Tuhan dengan manifestasi sebagai *Dewi Laksmi*, ada juga yang meyakini sebagai *Dewa Rambut Sedana*, pemberi keberuntungan dan kesejahteraan; para nelayan memuja manifestasi Tuhan sebagai penguasa laut dan samudera, yakni *Dewa Baruna* di *Pura Segara* yang biasanya didirikan ditepi pantai; para petani kebun memuja *Dewa Sangkara* sebagai manifestasi Tuhan yang melindungi dan menguasai tumbuh-tumbuhan di *Pura Alas Rasmini*, biasanya didirikan di tengah hutan.

d. *Pura Kahyangan Jagat*

Pura ini adalah tempat suci sebagai pemujaan umum dengan tidak membedakan asal-usul keluarga, asal *desa pakraman* maupun asal profesi/pekerjaan. Pura ini juga sebagai tempat pemujaan ke hadapan Tuhan dengan segala manifestasi dan fungsinya. Hal ini dimaksudkan ketika berada

dalam alam yang besar (makrokosmos) umat Hindu dapat memanfaatkan pura ini sebagai media membangun kesadaran universal sehingga berdampak pada pembangunan nasional untuk semua umat Hindu tanpa dikotomi.

Ada banyak pertimbangan yang digunakan untuk mendirikan pura Kahyangan Jagat. *Pertama*, konsep *rwa bhineda*, yaitu perpaduan dualitas antara *purusa-pradana* atau sederhananya perpaduan laki-perempuan, jiwa-raga, jasmani-rohani, *sekala-niskala*. *Kedua*, konsep *Catur Loka Pala* yaitu memohon perlindungan kepada Tuhan untuk mendapatkan rasa aman (*raksanam*) dan sejahtera (*dhanam*), melalui *Pura Kahyangan Jagat* di empat penjuru arah mata angin. *Catur Loka Pala* ini dikonsepsikan di *Pura Lempuyang Luhur* di Timur; *Pura Anda Kasa* di Selatan; *Pura Luhur Batu Karu* di Barat dan *Pura Puncak Mangu* di Utara. *Ketiga*, konsep *Sad Winaka* yaitu mengembangkan enam kebijaksanaan melalui *Sad Krtih*. *Keempat*, konsepsi *Padma Bhuawana* yaitu berdasarkan sembilan arah mata angin, seperti *Pura Besakih* di Timur Laut; *Pura Lempuyang Luhur* di Timur; *Pura Goa Lawah* di Tenggara; *Pura Anda Kasa* di Selatan; *Pura Luhur Ulu Watu* di Barat Daya; *Pura Luhur Batu Karu* di Barat; *Pura Puncak Mangu* di Barat Laut; *Pura Batur* di Utara dan *Pura Pusering Jagat* di Tengah pulau Bali.

2. Fungsi Pura dalam Kaitannya dengan Tri Hita Karana dan Tri Mandala

Pura sebagai telah secara selintas diuraikan, selain sebagai tempat melaksanakan aktivitas keagamaan yang bersifat religius, rohaniah dan batiniah, juga untuk kepentingan umat Hindu secara lahiriah, misalnya sosial, budaya dan ekonomi. Inilah yang kemudian diakomodir dalam tujuan agama Hindu, *mokshartam jagathita ya ca iti dharma*.

Fungsi pura dan tujuan agama Hindu tersebut sejalan dengan ajaran agama *Tri Hita Karana* yaitu tiga penyebab kebahagiaan jasmani dan rohani. Ajaran ini secara konkrit dilaksanakan secara harmoni dan seimbang baik secara vertikal maupun horizontal sesuai orientasi masing-masing bagiannya. Hubungan harmoni dan seimbang dilakukan *pertama*, kepada Tuhan melalui konsep *parahyangan*, seperti sembahyang, melaksanakan hari raya suci dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kepada Tuhan. *Kedua*, kepada sesama manusia yang dilakukan melalui konsep *pawongan*, seperti aktivitas sosial, budaya dan kegiatan kemanusiaan lainnya. *Ketiga*, kepada alam semesta yang dilakukan melalui

palemahan, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan mulai dari rumah hingga tempat suci, menjaga kesuburan tanah, tumbuhan dan binatang serta kegiatan yang berkenaan dengan pelestarian lingkungan.

Secara mikro dan filosofis, pelaksanaan dari *Tri Hita Karana* tersebut dilakukan di pura yang di Bali menganut konsep *Tri Mandala*, yakni pembagian pura berdasarkan struktur dan hirarki. Konsep ini memberikan ruang yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhannya. Adapun pembagian pura berdasarkan *Tri Mandala* adalah *nista mandala* atau *jaba sisi*, yaitu halaman paling luar dari pura, tempat bagi umat Hindu untuk melaksanakan aktivitas yang masih bersifat profan. Bangunan yang terdapat pada halaman ini biasanya kamar mandi, dapur, dll. *Madya mandala* atau *jaba tengah* adalah halaman yang terletak di bagian tengah sebuah pura yaitu tempat bagi umat manusia untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan tetapi untuk Tuhan. Bangunan yang biasanya terdapat di *madya mandala* adalah *bale kulkul*, *balai pertemuan*, dll. *Utama mandala* atau *jeroan* adalah halaman paling dalam sebagai tempat bagi umat Hindu untuk melaksanakan kegiatan rohani seperti sembahyang, semadi dll. Bangunan yang terdapat di utama mandala ini adalah *bale pawedan*, *padmasana*, *meru* dll.

Berbeda dengan tempat ibadat umat lainnya, pura di Bali steril dari kegiatan atau aktivitas jasmani, meskipun hal tersebut ada di *jaba sisi*, sehingga sangat jarang ditemukan di halaman paling luar, meskipun dimungkinkan, terdapat pasar, toko, atau sekolahan. Bahkan selalu ada peringatan ketika memasuki sebuah pura, misalnya dilarang masuk kepada mereka yang *cuntaka*, yakni keadaan kotor yang disebabkan anggota keluarga meninggal atau perempuan yang sedang haid. Pura di Bali tidak hanya mengenal konsep bersih tetapi suci, karena yang suci belum tentu bersih.

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

C. Model Pemberdayaan *Pura Desa* dan *Pura Puseh* Desa Pakraman Ubung

5. Profil Pura dan Umat *Pengempon*

Seperti pada umumnya *desa pakraman* di Kota Denpasar, Desa Pakraman Ubung juga memiliki *Kahyangan Tiga* dan masuk wilayah administrasi Kecamatan Denpasar Barat. *Pura Desa* biasanya terletak di tengah-tengah atau pusat desa, yaitu pura untuk memuja *Dewa Brahma* dengan manifestasi sebagai pencipta; *Pura Puseh* letaknya di hulu atau arah Timur pekarangan desa, tempat suci untuk memuja *Dewa Wisnu* sebagai pemelihara, dan *Pura Dalem* terletak di area kuburan (bhs Bali: *sema, setra*). *Pura Dalem* adalah sthana *Dewa Siwa* dengan fungsi sebagai *pemralina* atau pengembali semua yang ada di alam semesta. *Pura Dalem* biasanya juga berdekatan dengan *Pura Prajapati*, tempat bersthananya *Dewi Durga*, sakti dari *Dewa Siwa*. Dengan demikian, setiap *krama* atau umat di *desa pakraman* memuja *Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa* sebagai *Tri Murti*, yakni tiga manifestasi Tuhan sebagai pencipta-pemelihara-pemralina atau lahir-hidup-mati. Ketiganya menjadi siklus kehidupan umat Hindu. Untuk itulah *Kahyangan Tiga* menjadi tempat suci yang sangat dihormati.

Masalah letak *Kahyangan Tiga* tidak bersifat mutlak seperti di atas, karena tetap harus disesuaikan dengan tipologi *desa pakraman*, juga konsensus bersama yang diselesaikan secara adat, sepanjang disepakati dengan nilai-nilai kebersamaan. Misalnya, jika di *desa pakraman* tersebut tidak memiliki pekarangan yang luas, maka ada kesepakatan tertentu yang dibuat bersama. Falsafah inilah yang membuat *krama desa pakraman* menempatkan *Pura Desa* dan *Pura Puseh* menjadi satu *panyenger* (Bhs Ind: tembok pembatas), hanya dibatasi tembok pembatas, dan bahkan memiliki hari suci *piodalan*¹⁹ yang sama. *Piodalan Pura Desa* dan *Pura Puseh* adalah *Saniscara Kliwon Wuku Kuningan*. *Kahyangan Tiga* Desa Pakraman Ubung terletak di Banjar Sedana Mertha.

Selain *Kahyangan Tiga*, di Desa Pakraman Ubung juga terdapat pura di masing-masing banjar, *pura panti, sanggah/pemrajan, pura subak, pura bedugul*

¹⁹ *Piodalan* sering juga disebut *rerahinan*, yaitu peringatan *tegak ngenteg linggih* sebuah pura. Untuk memahami secara sederhana, dalam bahasa Indonesia, *piodalan* sering dipadankan seperti hari ulang tahun, meski masih tidak sepenuhnya tepat seperti itu.

dan *pura melanting*. Berdasarkan data dalam *Ika Ilikita*, di Desa Pakraman Ubung terdapat 37 pura. Pada saat *piodalan*, di *Kahyangan Tiga* selalu dilaksanakan persembahyangan bersama dimulai dengan *Tri Sandhya* dan *kramaning sembah*. Persembahyangan yang sama juga dilakukan pada saat hari-hari suci lainnya, seperti *pujama*, *tilem*, *saraswati*, *siwaratri*, *galungan*, *kuningan*, dll. Sampai saat ini, khusus untuk *Pura Desa* dan *Pura Puseh* belum dapat diuraikan secara jelas asal usul dan sejarahnya, bahkan belum dapat diuraikan dalam *Eka Ilikita*.

Pura Desa dan *Pura Puseh* yang berada di tengah Desa Pakraman Ubung berbatasan langsung dengan Desa Pakraman Pohgading di sebelah Utara, Tukad Badung di sebelah Timur, Desa Pakraman Denpasar di sebelah Selatan dan Tukad Mati di sebelah Barat. Adapun perumahan krama dibatasi oleh tembok panyengker, dianjurkan menghadap ke jalan sehingga terlihat asri serta membuat taman-taman di depan rumah, dan paling penting di sekitar *sangghah* ditanam pohon berbunga.

Adapun total luas Desa Pakraman Ubung adalah 184.878 ha yang terbagi ke dalam pekarangan umah seluas 78.87 ha, tanah tegalan 104.878 ha dan tempat suci seluas 1.13 ha. Untuk membuat kenyamanan krama dilakukan ragam kegiatan seperti membersihkan sampah setiap hari yang di mana masing-masing banjar memberikan dua tenaga tukang sampah, setiap minggu oleh krama banjar, PKK dan *sekeha*. Sedangkan kelestarian taman desa dilaksanakan oleh *Sekeha Teruma* dari masing-masing banjar.

Pura Desa dan *Pura Puseh* sebagai bagian dari *Kahyangan Tiga* diempon oleh *krama* Desa Pakraman Ubung yang menurut data dalam *Eka Ilikita* berjumlah 424 kepala keluarga, yang tersebar di masing-masing banjar, yaitu Banjar Sedana Mertha (118); Banjar Tengah (101); Banjar Sari (101); Banjar Batur (50) dan Banjar Merta Gangga (54). *Krama desa pakraman* ini adalah mereka yang sudah memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *awig-awig desa pakraman* yang telah dituliskan sejak 29 Januari 1983.

Selain *krama* yang tersebar di banjar, di Desa Pakraman Ubung juga memiliki *Sekeha Teruna* yang juga terdapat di masing-masing banjar. *Sekeha*²⁰

²⁰ *Sekeha* atau juga disebut *sekaa* adalah perkumpulan atau organisasi yang terdapat di banjar atau institusi lain, misalnya, perkumpulan pemuda di banjar dikenal dengan *Sekeha Teruna*. *Sekeha* juga merupakan perkumpulan orang-orang memiliki kesamaan minat terutama kesenian, sehingga di Bali

yang lain adalah *Sekeha Pesantian*, *Sekeha Gong*, *Sekeha Barong* dan *Sekeha Rurung*. Semua sekeha ini sangat aktif dalam membuat denyut agama, adat dan budaya Bali. Krama Desa Pakraman Ubung memiliki pekerjaan yang beragam, seperti buruh, dagang, tukang bangunan (biasanya bangunan khas Bali), tukang jahit, PNS dan TNI.

Kehidupan adat *krama* Desa Pakraman Ubung ditata sedemikian rupa melalui *prajuru-prajuru* yang terdapat mulai dari organisasi terkecil, seperti *kelian maksan*, *kelihan banjar* hingga *kelihan desa* yang biasa disebut *Jero Desa* yang dibantu empat *baga* atau wakil ketua sesuai bidang-bidang yang ditentukan, antara lain Wakil Ketua I (*Petajuh Baga Parahyangan*) yang bertugas dalam urusan persembahyangan dan pura; Wakil Ketua II (*Petajuh Baga Palemahan*) yang bertugas mengurus soal lingkungan dan tata ruang desa; Wakil Ketua III (*Petajuh Baga Pawongan*) yang bertugas mengurus siklus hidup seperti perkawinan, cerai, ngaben, dan upacara lainnya dan Wakil Ketua IV (*Petajuh Baga Badan Usaha Milik Desa/BUMDES*) yang bertugas memutar roda ekonomi dan usaha desa. Selain empat *baga*, *Jero Bendesa* juga dibantu oleh Sekretaris I (*Penyarikan I*), Sekretaris II (*Penyarikan II*) dan Bendahara (*Petengen*).

Kelihan Desa dengan perangkatnya adalah adalah semacam lembaga eksekutif yang dalam menjalankan program dan kegiatannya diawasi oleh semacam lembaga yudikatif, yakni *Kertha Desa*. Sedangkan lembaga yang bertugas menjadi mediator untuk melakukan musyawarah adalah *Sabha Desa* atau semacam legislatif. Seluruh permasalahan yang ada di *desa pakraman* diselenggarakan secara sinergis antarlembaga tersebut. Untuk menunjang dan mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh tugas yang dijalankan, *Kelihan Desa* dibantu oleh selain krama, juga *prajuru-prajuru* dimasing-masing banjar serta alat-alat desa untuk memberikan rasa aman krama, seperti *pecalang* yang saat ini memiliki aset satu mobil dan empat motor patroli.

6. Pengelolaan Dana dan Optimalisasi Modal Sosial

Sebagaimana diceritakan oleh Jero Bendesa Desa Pakraman Ubung, I Dewa Putu Mayun (wawancara tanggal 22 Mei 2014), Pemerintah Daerah Bali sangat memperhatikan keberadaan dan ketahanan seluruh *desa pakraman*. Menurut

banyak ditemukan Sekeha Gambelan, *Sekeha Santi*, dll. Sekeha juga terbentuk karena kesamaan profesi, misalnya *Sekeha Subak*, *Sekeha Semal*, *Sekeha Manyi*, dll

Mayun, hal ini menjadi strategi kebudayaan untuk menjadikan *desa pakraman* sebagai benteng kokoh untuk menyaring arus kencang globalisasi yang masuk melalui investasi ekonomi seperti pembangunan dan *tourisme*.

Informasi dari Mayun, yang juga diiyakan oleh Sekretaris I, I Made Jesna, setiap tahun selalu ada dana pembinaan yang diberikan oleh Pemda Bali, karena Pemda sangat berkepentingan untuk memperkuat *desa pakraman*. Jesna mengatakan Bali bisa seperti ini karena keberadaan *desa pakraman* masih mempertahankan tradisi luhur dan mampu berkolaborasi dengan desa dinas sebagai wakil pemerintah. Menurut dua pengurus inti *desa pakraman* ini, bantuan yang diterima setiap tahunnya selalu meningkat. Tahun lalu mendapatkan bantuan 100 juta dari Pemda Tk I Bali, dan 25 juta dari Pemkot Denpasar.

Miarsa dan beberapa *krama* yang hadir dalam *forum group discussion* (FGD) tanggal 24 Mei 2014, mengharapkan bantuan yang besar datang dari Kementerian Agama untuk aktivitas keagamaan, namun ternyata masih sangat minim, yakni hanya 50 juta dan tahun ini masih belum direalisasikan.²¹ Kondisi ini dibenarkan oleh Ni Ketut Oka Sutriani, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Ia bahkan meminta maaf karena baru kali ini bisa memberikan bantuan kepada Desa Pakraman Ubung. Secara kompak, peserta FGD tetap memberikan apresiasi seraya optimis bantuan tersebut bisa direalisasikan karena seluruh prosedur telah dilalui dengan baik.

Senada dengan peserta FGD, I Dewa Putu Mayun dan I Made Jesna mengatakan bahwa meskipun bantuan dari Pemda dan Kementerian Agama yang diterima masih kecil, Desa Pakraman Ubung telah sejak lama memiliki mekanisme untuk mengatasi masalah ini, namun tetap tidak memberatkan *krama desa pakraman*. Mayun menjelaskan bahwa meski *desa pakraman* tidak memiliki *pelaba* (bhs Ind: aset atau barang berharga, biasanya dalam bentuk tanah) berupa tanah seperti *desa pakraman* lainnya, namun Desa Pakraman Ubung memiliki cukup aset berupa Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yaitu lembaga simpan pinjam *krama desa* dan pasar desa yang keduanya dikelola oleh BUMDES. Setiap tahun, LPD dan pasar mampu memberikan subsidi sebesar 20% dari laba yang diperoleh atau sekitar 600 juta.

²¹ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Penyuluh Agama Hindu dan Prajuru Desa Pakraman, dana 50 juta dari Kementerian Agama Kota Denpasar akan digunakan untuk membangun *bataran* (pondasi dasar Pura Desa), namun sampai saat ini belum bisa direalisasikan karena menunggu hari baik untuk membangun, yang di Bali dikenal *dewasa hayu*.

Sumber dana lain yang digunakan untuk memberdayakan pura dan umat diperoleh dari iuran *krama banjar* yang besarnya tidak dibuat seragam tergantung kemampuan setiap banjar serta bersifat insidental, seperti *piodalan* dan kegiatan lainnya. Secara tegas dapat dikatakan sumber pembiayaan untuk pemberdayaan pura lebih banyak dilakukan secara swadaya. Bahkan para pemuda juga secara kreatif mencari dana untuk kebutuhan mereka dengan mengadakan bazaar murah pada setiap hari raya, terutama *Galungan* dan *Kuningan*. Biasanya aktivitas ini dilakukan di banjar-banjar.

7. Kegiatan Pelayanan Ibadat, Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Pemberdayaan Umat

Pengelolaan modal sosial yang dimiliki pura sejalan secara koheren dengan program dari *desa pakraman* yang dituangkan sepenuhnya ke dalam *Ika Ilikita*, dan secara linear berkorelasi dengan tujuan agama Hindu melalui *Tri Hita Karana*. Bagaimana Desa Pakraman Ubung mengelola dan memberdayakan modal sosial yang mereka miliki, dapat dilihat dari program yang mereka lakukan selama ini.

Seluruh program ini berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan pemberdayaan umat, antara lain:

Bidang *Parhyangan*:

- a) Memberikan bantuan secara rutin tiap *pujawali* kepada *Pura Kahyangan Desa*
- b) Membangun *Bale Pedaunan Pura Desa* dan *Puseh*
- c) Mengadakan persembahyangan bersama saat *Purnama/Tilem*, *Siwaratri*, *Saraswati* dan *Pujawali*
- d) Pelaksanaan upacara/*upakara* sebagai prosesi pergantian Tahun Baru Caka dari *melasti*, *mecaru* dan *Nyepi*
- e) Dharmayatra ke situs-situs atau peninggalan kerajaan Hindu di Jawa Timur

Bidang *Pawongan*:

- a) Melaksanakan Pasraman anak-anak dan remaja
- b) Meningkatkan peran lembaga adat sesuai dengan aturan/kewenangan desa/banjar
- c) Meningkatkan keahlian kaum perempuan dalam membuat upacara/bebantenan dan upacara agama melalui kursus-kursus

- d) Meningkatkan peran serta *krama desa* dalam menghadapi gangguan keamanan (bankamdes)
- e) Sosialisasi tentang rencana nyekah missal tahun 2015
- f) Membantu anggota yang meninggal 1.000.000,-
- g) Mensubsidi biaya sekolah pada anak-anak yang akan masuk di TK/PAUD Widyasanti
- h) Melakukan pendataan *krama desa* sesuai dengan tingkat umur sebagai upaya mengoptimalkan peran *desa pakraman* terhadap perkembangan anggota dalam hal tertib administrasi kependudukan
- i) Mengadakan koordinasi dengan desa dinas (kelurahan) sebagai upaya membangun sinergitas antarlembaga ditingkat desa
- j) Pembinaan bidang seni dan budaya terhadap generasi muda/remaja dengan mengadakan pelatihan bersama antarbanjar se-*desa pakraman*
- k) Merivisi *awig-awig* desa, menyesuaikan dengan keadaan saat ini dan mensosialisasikan pada *krama desa*

Bidang *Palemahan*:

- a) Menetapkan batas wilayah *desa pakraman*
- b) Menetapkan batas-batas tanah milik desa
- c) Membersihkan/menata *palemahan*/halaman *Pura Desa* dan *Puseh* melalui tamanisasi lingkungan pura
- d) Mengajukan permohonan kepada pemerintah agar dapat membuat jalur irigasi utama dari hulu sampai ke hilir/pembuangan di sungai Badung untuk mengatasi banjir
- e) Melestarikan sumber-sumber mata air yang ada dilingkungan *desa pakraman*
- f) Melaksanakan kerja bakti gotong royong kebersihan tiap minggu pertama bagi *krama laki-laki* dan minggu ketiga bagi *krama perempuan*
- g) Mengelola sampah secara swadaya
- h) Membuat resapan air (biopori) disetiap keluarga sebagai upaya mengurangi banjir dan menjaga air tanah

Sumber dana yang diperoleh Desa Pakraman Ubung, terutama dari Pemda Bali, dan terutama swadaya dari *krama*, sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar *krama* dari berbagai aspek. Sesuai dengan LPJ Desa Pakraman Ubung yang selalu dilaporkan tiap tahun baru *caka* (sekitar bulan April), sumber pembiayaan tersebut digunakan untuk aspek-aspek berikut ini.

a) Aspek Sosial-Budaya

- 1) Memberikan santunan kepada krama yang meninggal sebesar 1 juta. Selain dari *desa pakraman*, krama yang terkena duka meninggal juga diberikan *patis* oleh krama dilingkungan banjanya senilai harga 1 kg beras dan 5000.
- 2) Melakukan pembinaan terhadap *sekeha* yang ada di *desa pakraman*, melalui penguatan *sekeha-sekeha* yang ada di masing-masing banjar, baik yang dilakukan oleh para pemuda melalui *Sekeha Teruna* maupun para ibu-ibu melalui organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
- 3) Melibatkan *sekeha* dalam setiap kompetisi seni, budaya dan olah raga yang diadakan setiap tahun oleh Pemkot Denpasar, seperti lomba *ogoh-ogoh*, *gong kebyar* dan *utsawa dharma gita*.
- 4) Membentuk Gabungan Anak-Anak Gemar Seni Bali (GANGSA) dengan struktur langsung berada di bawah binaan *desa pakraman*
- 5) Melaksanakan Pasraman Kilat pada hari libur sekolah setiap tahun sekali dan membiayai penyelenggaraan PAUD/TK
- 6) Memberikan pelatihan *sarati banten* kepada ibu-ibu

b) Aspek Agama

- 1) Melakukan *memukur massal* yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali
- 2) Melaksanakan persembahyangan hari-hari suci keagamaan
- 3) Melaksanakan *dharmayatra* setiap tahun ke pura maupun tempat-tempat bersejarah
- 4) Mengembangkan prasarana pura berdasarkan bantuan tempat ibadah yang diterima
- 5) Memberdayakan para pemuda untuk *ngayah* di pura jika ada kegiatan keagamaan melalui *tabuh*
- 6) Memberikan peran kepada ibu-ibu untuk *ngayah* sebagai *sarati banten*
- 7) Membuat dan atau membeli bahan upakara untuk kepentingan upacara agama
- 8) Menjadikan pura, terutama *madya mandala* sebagai tempat untuk melakukan aktivitas agama saat upacara keagamaan

c) Aspek Ekonomi

- 1) Memberikan gaji kepada para pegawai LPD
- 2) Mengelola pasar desa

- 3) Memberikan insentif kepada pekerja sampah

8. Faktor Pendukung dan Penghambat

a) Faktor Pendukung

- 1) Terdapat sinergi tiga kekuatan *desa pakraman*, yakni *Bendesa Adat* (eksekutif), *Kertha Desa* (yudikatif) dan *Sabha Desa* (legislatif) sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuat oleh *desa pakraman* berjalan secara terbuka, transparan dan akuntabel. Pola ini memperlihatkan adanya kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) masing-masing lembaga dan dipersatukan oleh nilai-nilai agama sebagai pengikat moral.
- 2) Telah sejak lama, *awig-awig* dan *perarem* menjadi garis-garis haluan *desa pakraman* sekaligus legitimasi agama karena melibatkan hal-hal yang bersifat religius, rohaniah dan *niskala*, salah satunya dengan meyakini berlakunya *hukum karma*. Keyakinan ini menyertai pemimpin dan pengurus lembaga-lembaga adat dan agama untuk menjadikan pengabdian mereka lebih banyak didasari oleh kebutuhan rohani. Bagi mereka, menjadi *prajuru desa pakraman* adalah sebuah panggilan *yajna*.
- 3) Selain melalui hubungan yang harmoni antartiga lembaga di atas, di Desa Pakraman Ubung, seperti *desa pakraman* lainnya, berlaku pula pelaksanaan *Catur Guru*,²² di mana pemerintah, dalam hal ini desa dinas dianggap sebagai *Guru Wisesa* yang wajib diajak bekerja sama dan dimintakan sarannya. Selama ini, *Jero Bendesa* dan para *prajuru* lainnya selalu melakukan kerjasama yang baik terutama meminta saran dan pertimbangan dalam mengelola dana bantuan. Hal ini mereka lakukan karena selama ini ada hambatan administrasi dan prosedur. Seperti diketahui, di Bali, terdapat desa dinas dan desa adat. Keduanya bukanlah bentuk dualisme tetapi justru dualitas yang saling melengkapi sesuai tugas dan fungsinya. Dalam desa dinas, peraturan yang berlaku bersifat nasional, sebagai perbantuan dari pemerintahan di atasnya, yaitu Kecamatan, Kabupaten/Kota, atau Provinsi. Desa adat mengelola urusan

²² *Catur Guru* adalah empat guru yang harus dihormati oleh umat Hindu. Keempatnya adalah *guru rupaka* (orang tua), *guru pengajian* (guru, dosen atau mereka yang memberikan ilmu pengetahuan), *guru wisesa* (pemerintah dan perangkat negara lainnya), *guru swadyaya* (Tuhan)

agama, adat dan budaya. Sehingga bagi *desa pakraman*, bantuan dana yang mereka terima, terlebih untuk kepentingan pura harus jauh dari tindakan menyimpang.

b) Faktor Penghambat

- 1) Bantuan-bantuan yang diterima selama ini masih dianggap belum mencukupi kebutuhan riil tiap tahun *desa pakraman* karena mereka menghabiskan anggaran lebih dari 1 milyar untuk berbagai kegiatan, baik kegiatan fisik maupun non fisik.²² Artinya bantuan tidak utuh untuk satu kegiatan atau bangunan yang diajukan. Namun bagi mereka, bantuan-bantuan yang diterima selama ini dianggap sebagai stimulus semata agar *krama* termotivasi menjalankan seluruh kegiatan *desa pakraman*. Bahkan menurutnya, bantuan yang diterima belum cukup untuk mendanai upacara keagamaan.
- 2) Meski bukan sebuah hambatan, adanya ketentuan bahwa pura itu suci, para prajuru tidak bisa leluasa untuk memberdayakannya dengan aktivitas di luar keagamaan. Atas dasar ini, pemberdayaan pendidikan yang bersifat sekuler seperti PAUD/TK tidak bisa diselenggarakan di area pura. Berbeda dengan pendidikan ini, pasraman kilat dan malam sastra yang dilaksanakan setiap tahun atau bertepatan dengan hari suci dapat dilaksanakan di area pura karena selain bersifat temporer juga karena bernuansa agama.

D. Model Pemberdayaan *Pura Subak Pakel II* Desa Pakraman Ubung Kaja

5. Profil dan umat *pengempon*

Pura Subak Pakel II adalah salah satu *pura swagina* yang *pengemponnya* berprofesi sebagai petani, terutama petani penggarap di sawah. Pura ini tidak terlalu besar, dan dahulu berada di tengah sawah. Kini karena banyak sawah beralih fungsi menjadi perumahan dan industri, pura ini tampak kecil dan sempit

²² Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Keuangan Desa Pakraman Ubung per 31 Maret 2014, dana masuk ke kas Desa Pakraman mencapai 5.679.286.900, dengan pengeluaran mencapai pada periode tersebut 751.221.300. Saldo yang tersisa dari rekapitulasi ini masih sekitar 4.928.065.600. Jika dibandingkan dengan bantuan yang diterima dari pemerintah, tentu tidak cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan *desa pakraman* yang terbagi ke dalam biaya untuk *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Dapat dikatakan, seluruh dana tersebut lebih banyak habis untuk kegiatan non-fisik, seperti *upakara* dan upacara agama.

karena berdampingan dengan rumah dan pertokoan. Di depan pura ada sebidang sawah namun terhimpit bangunan di sebelah kanan, kiri dan belakangnya.

Bangunan pura tampak baru dipugar, terutama pada *penyengkernya*. Terlihat batu bata yang menjadi bahan dominan dari *penyengker* cukup kokoh dengan warna merah kehitamannya. Di dalamnya terdapat *bale*, biasanya digunakan untuk pertemuan maupun persembahyangan yang dilaksanakan setiap *Purnama Sasih Kapat*. Di pojok kanan dari *candi bentar* terdapat *bale kulkul* (bhs Ind: kentongan) yang *kulkulnya* terlihat ringkih karena cukup tua dan termakan jaman. Di bagian hulu terdapat *pelinggih* tempat memuja Dewi atau *Bhatara Sri* sebagai perwujudan Tuhan yang berfungsi memberikan kemakmuran kepada para petani.

Meski terbilang kecil untuk ukuran sebuah *pura subak*, aktivitas *pengempon* dan umat Hindu disekitarnya cukup dinamis, ditambah letaknya yang tepat dipinggir jalan, serta jalanan sempit yang membelah pura dengan bangunan disebaliknya. Dari jauh pura ini terlihat selalu ramai karena kendaraan melambatkan lajunya.

Dengan letaknya yang kini berdekatan dengan rumah-rumah penduduk, mungkin di masa lalu tidak terbayangkan pura ini seperti terjepit. Bahkan pernah suatu ketika pura ini hendak di *pralina* (bhs Ind: dihilangkan) karena jumlah sawah yang makin berkurang dan masyarakat beralih ke sektor lain, terutama industri pariwisata. Bahkan para pemilik tanah atau sawah di desa ini sudah mulai memberikan peluang bagi pendatang untuk memiliki tanah, dan hal ini menambah semakin terbatasnya jumlah luas sawah yang berarti pula mengurangi pekerja atau penggarap. Padahal kelangsungan pura ini sangat tergantung dari dua hal ini.

Secara geografis, *Pura Subak Pakel II* terletak di Desa Pakraman Ubung Kaja yang berbatasan dengan Desa Adat Sading disebelah Utara, Tukad Badung Pakel II di sebelah Timur, Banjar Benoh disebelah Selatan dan Tukad Yeh Keling disebelah Barat. Desa Pakraman Ubung Kaja tempat di mana pura ini berada secara topografi bentuk datarannya bergelombang dengan ketinggian lebih kurang 46 m dari permukaan air laut, sedangkan tingkat kesuburan tanahnya sedang. Adapun status kepemilikan tanah terdiri dari sawah hak milik 82.50 ha, sawah *pelaba* pura 2.87 ha dan tidak ada sawah negara yang digarap. Total sawah yang dimiliki atau digarap adalah 85.37 ha.

Secara kelembagaan, *Pura Subak Pakel II* ini diempon oleh *krama* petani Desa Pakraman Ubung Kaja. *Krama* tersebut berasal dari jumlah pemilik sawah sebanyak 175 orang, petani pemilik (75), petani *penyakap* (50) dan petani pemakai air (125).²³ Terdapat ketentuan bahwa pemilik sawah belum tentu menjadi *krama subak*, namun *penyakap* atau penggarap wajib ikut menjadi *krama subak*.

Menurut I Nyoman Narta (wawancara tanggal 23 Mei 2014), *pengempon* pura memang adalah para petani, namun jumlah *krama* yang ikut berkontribusi terhadap keberadaan pura ini datang dari *krama* yang bukan bekerja sebagai petani. Bahkan ada di antara mereka yang bukan *krama* Desa Pakraman Ubung Kaja. Hal ini bisa terjadi masyarakat yang membeli dan menjadikan tanah atau sawah sebagai tempat tinggal atau warung dan toko memiliki keyakinan bahwa mereka juga ingin mendapatkan kerahayuan dari *Bhatara Sri* sebagai “pemilik” tanah dan sawah. Atas keyakinan ini mereka juga ikut berkewajiban secara moral bersama-sama dengan petani lainnya menjadikan *Pura Subak Pakel II* ini sebagai pusat pemujaan dewi kemakmuran. Petani dan yang bukan petani tetapi membeli dan berwirausaha di atas tanah sama-sama memiliki ketergantungan terhadap *pura subak* ini.

Atas alasan tersebut, pura ini masih tetap bisa berdiri tegak dan menjadi milik bersama secara kolektif. Sehingga ketika ada *piodalan* dan hari-hari suci keagamaan lainnya, pura ini sangat ramai dipuja umat Hindu. Melalui pura ini pula, mereka ingin menjadikannya sebagai media untuk meneruskan ilmu dan mengajarkan kepada anak-anak muda di Desa Pakraman Ubung Kaja untuk tetap mencintai profesi petani yang di Kota Denpasar mulai ditinggalkan. Narta menegaskan, mungkin di daerah luar Denpasar, *krama subak* belum terlalu risau karena masih terdapat sawah-sawah yang luas dan penggarap yang juga sangat banyak.

Dengan segala keterbatasannya, para pengurus *subak* masih bersemangat untuk melakukan aktivitas pertanian. Mereka memperkuat diri melalui kepengurusan organisasi *subak* yang dipimpin oleh seorang *Pekaseh* (bhs Ind: pemimpin) dan lima orang *Pangliman* yang bertugas dimasing-masing wilayah

²³ Monograf Subak Pakel II, tahun 1999/2000. Namun kini seperti penuturan I Nyoman Narta selaku Kelihan Subak, pemilik sawah tinggal 114 orang

dengan dibantu *Kelihan Munduk* serta melalui pengurus *subak* dengan seorang Ketua dibantu Sekretaris, Bendahara dan *prajuru* atau *kesinoman*.

6. Pengelolaan Dana dan Optimalisasi Modal Sosial

Secara selintas telah disebutkan di atas, *pura subak* ini sempat hendak di *pralina* karena dirasakan sudah terdesak oleh keterbatasan lahan dan sumber daya manusia. Namun atas keinginan mempertahankan salah satu heritage atau warisan dunia ini, mereka tetap menjadikan *pura subak* ini sebagai pengikat moral untuk memuja *Bhatara Sri*. Usaha ini tentu terasa berat karena pura ini juga harus terus menerus dipelihara serta dipertahankan melalui berbagai aktivitas keagamaan, sosial dan budaya.

I Nyoman Narta beserta para anggotanya merasakan beratnya tanggung jawab ini. Apa yang mereka lakukan lebih karena pengabdian kepada leluhur dan Tuhan, dalam hal ini termanifestasi ke dalam sosok *Bhatara Sri*. Sebagai petani, hanya pengabdian ini yang mereka bisa persembahkan, sama halnya persembahan para pedagang kepada *Dewa Rambut Sedana* di *Pura Melanting* atau para nelayan kepada *Dewa Baruna* di *Pura Segara*. Tentu pengabdian tinggi ini tidak sebanding dengan insentif yang mereka terima setiap bulan sebesar 500 ribu dari Pemda Tk I Bali.

Mengingat *subak* telah menjadi heritage, para pengurus tiap tahun mendapat subsidi dari Pemda Bali yang tiap tahun meningkat jumlahnya, mulai dari 30 juta hingga 55 juta. Bantuan dana ini lebih banyak mereka gunakan untuk upacara keagamaan dan biasanya tidak cukup, karena dalam setahun mereka bisa menghabiskan biaya di atas 100 juta.

Sumber dana untuk membiayai kelangsungan aktivitas *subak* selain dari pemerintah juga dari iuran tidak wajib para anggotanya. Mereka sadar bahwa hasil pertanian tidak cukup membuat mereka hidup berkecukupan, sehingga nilai iuran ini bersifat tidak wajib dan sukarela sesuai kemampuan. Mereka menjalankan kewajiban sebagai anggota yang terikat secara *niskala* dan para penggarap tidak bisa menolak untuk tidak menjadi *krama subak*.²⁴

²⁴ Secara terinci, sumber-sumber dana untuk mempertahankan pura Subak dan kelangsungan hidup para pengemponnya berasal dari bantuan insentif dari pemerintah; hasil pungutan dari utpeti itik Rp. 50./ekor setiap panen di sawah; sari tahun (penguot) Rp. 50,- per are setiap panen di sawah, urunan dari krama subak dan segala yang bersifat dana (Monograf Subak Pakel II, tahun 1999/2000: 11

Pada tahun 2013 lalu, mereka baru pertama kali mendapat bantuan biaya dari Kementerian Agama Kota Denpasar sebesar 25 juta. Dana ini telah habis mereka gunakan untuk membuat *panyengker* pura yang menelan biaya lebih dari 100 juta, dan bantuan 25 juta sebetulnya hanya bisa mereka gunakan membeli batu bata saja. Selebihnya dari iuran tidak wajib, dana punia dan bantuan Pemda lainnya, terutama Dinas Pertanian dan Dinas Kebudayaan.

Menurut Narta, meskipun dana 25 juta terbilang sangat minim, tetapi sudah cukup membantu meringankan beban *krama subak*. Dalam LPJ yang mereka sampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, terbaca jelas bagaimana mereka menggunakan dana tersebut dengan baik. Oleh I Ketut Warta selaku Kasi Urusan Agama antara proposal yang diajukan, realisasi dan prosedur administrasi telah dilalui dengan cukup baik oleh Panitia Pembangunan, sebagaimana dalam laporan berikut ini.

Uraian Penggunaan Bantuan Pura Subak Pakel II

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bidang Parhyangan Tembok Penyengker Pura Subak				
I	Pembelian Bahan			
	Batu Bata	7000 bh	1.500	10.500.000,-
	Besi ulat	40 mtr	14.000	560.000
	Semen Gresik 40 kg	20 sak	51.000	1.020.000
	Pasir urug	5 colt	200.000	1.000.000
	Ember	2 bh	10.000	20.000
Jumlah				13.100.000
II	Ongkos Tukang			
	Nama Tukang	Jumlah Hari	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	I Wayan Mudita	35 hari	100.000	3.500.000
	I Made Kuryata	35 hari	100.000	3.500.000
	Wayan Juliarta	35 hari	70.000	2.450.000
	Wayan Bagiana	35 hari	70.000	2.450.000
Jumlah				11.900.000
Jumlah Total				25.000.000

Sumber: Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Tahun 2013

7. Kegiatan Pelayanan Ibadat, Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Pemberdayaan Umat

Mengingat *Pura Subak Pakel II* adalah *pura swagina* maka pemberdayaannya lebih diarahkan hanya untuk hal-hal yang berkenaan dengan profesi para *pengemponnya*. Dengan demikian, pura menjadi titik pusat atau sumber kehidupan di mana vibrasi religiusitasnya diyakini sebagai penuntun dalam menjalankan pekerjaan sebagai petani.

Nilai-nilai tersebut mengalir berbagai kegiatan yang dilakukan para *pengemponnya* dan menjadi modal untuk mengukuhkan diri sebagai komunitas yang memiliki identitas berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Ada beberapa bidang yang menjadi panduan para *pengempon pura subak*, antara lain bidang agama, pengairan, pertanian, perikanan, peternakan, agrarian, administrasi dan keuangan.²⁵

Berdasarkan bidang-bidang tersebut, dituangkan sepenuhnya ke dalam program kerja *subak*, yaitu:

- a) Program Jangka Pendek
 - 1) Melaksanakan dan memelihara sistim kerta masa dan pola tanam
 - 2) Mentaati *awig-awig* dan *pasuara subak*
 - 3) Melaksanakan *aci* (upacara di *Pasubakan*)
 - 4) Melaksanakan dan memelihara stabilitas dan kelestarian yang meliputi *Parhyangan (Pura Penghulu Subak)*, saluran-saluran air, dan mengatur sistim pengairan semaksimal mungkin
 - 5) Melaksanakan Panca Usaha Pertanian agar tercapai program peningkatan hasil pangan dan usaha pertanian yang terpadu
 - 6) Meningkatkan sumber dana/sumber modal subak
- b) Program Jangka Panjang
 - 1) Merehabilitasi sarana-sarana pengairan yang rusak
 - 2) Meningkatkan hasil petani dengan sistem Paket D
 - 3) Mentaati iuran termasuk pelunasan Ipeda/PBB
 - 4) Merehabilitasi *Parhyangan Pura Penghulu Subak*
 - 5) Membuat *Bale Kulkul*
 - 6) Membuat *Bale Timbang*

²⁵ *Ibid*, hlm 11-12

Berdasarkan wawancara dengan para *prajuru subak*, mereka mengatakan bahwa pemberdayaan *krama subak* dengan menjadikan pura sebagai sumber inspirasi telah membawa mereka pada satu ikatan keluarga yang kuat. Mereka meyakini, dengan profesi petani, *Bhatara Sri* akan selalu hadir untuk memberikan kemakmuran. *Bhatara Sri* dan *pura subak* telah menjadi legitimasi moral dan agama untuk memohon kerahayuan, dan dengan itu semua, terdapat kesadaran kolektif di antara mereka untuk terus mempertahankan pura dan sawah-sawah karena hampir 90% subak berurusan dengan tanah atau *palemahan*.

Setidaknya ada beberapa bentuk pemberdayaan yang dilakukan, antara lain: *Pertama*, melalui pura, mereka, para *prajuru* itu berusaha terus membina *krama subak* melalui berbagai kegiatan, namun yang paling utama adalah pembinaan pada tingkat *kelihan munduk* karena permasalahan utama dalam pertanian dimulai dari pengaturan air atau irigasi. Dikalangan petani di Bali pada umumnya, tidak jarang masalah air bisa menjadi masalah besar, bahkan konflik antarsubak sering terjadi. *Kelihan munduk* bertanggung jawab terhadap keteraturan pembagian air. Menurut I Nyoman Narta, pembinaan dan penyuluhan yang mereka dapatkan baik dari Dinas Pertanian maupun Dinas Kebudayaan memprioritaskan *kelihan munduk* untuk mendapatkan bimbingan teknis. Bahkan dalam setahun para *kelihan munduk* mendapat bimbingan teknis 3 kali setahun.

Kedua, melibatkan peran serta *krama subak* untuk mengikuti berbagai lomba seni yang terutama sering dilaksanakan Dinas Pertanian dan Dinas Kebudayaan, misalnya *Lomba Lelakut*, *Lomba Sunari*, *Lomba Pindekan*, serta lomba-lomba lain yang berkenaan dengan pertanian yang diadakan dalam rangka ulang tahun Pemda Kota Denpasar.

Ketiga, memberdayakan peran aktif *krama subak* melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapotan) Bina Bhakti Lestari sebagai wadah simpan pinjam dan kebutuhan dasar para petani. Mereka berharap ide ini menjadi embrio lahirnya koperasi dengan alasan bahwa kesulitan para petani yang semakin besar, juga atas pikiran supaya kelangsungan hidup petani dan anak-anaknya dapat dijamin. Gagasan untuk menjadikan Gapotan sebagai koperasi juga untuk berinvestasi sosial dengan memanfaatkan subsidi dari berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun iuran *krama subak*.

Keempat, menyadari tantangan yang tidak ringan di masa-masa yang akan datang, *krama subak* menjadikan pura bukan lagi hanya sebagai pengikat *sraddha*

dan *bhakti* melalui aktivitas agama, tetapi juga menjadi media untuk menemukan solusi-solusi pertanian melalui pertemuan di *bale*. Dengan demikian pura bagi mereka berfungsi kompleks baik untuk urusan *niskala* (sakral) maupun *sekala* (profan), sehingga kesadaran kolektif di antara mereka terbangun semakin kuat.

8. Faktor Pendukung dan Penghambat

a) Faktor Pendukung

- 1) Adanya kesamaan profesi dapat melahirkan apa yang dalam ilmu antropologi sebut sebagai kesadaran kolektif. Solidaritas ini tumbuh atas berbagai hambatan berupa keengganan anak-anak petani melanjutkan profesi orang tua dan keterbatasan lahan sawah
- 2) *Subak* adalah salah satu heritage dan warisan dunia, sehingga para *pengempon Pura Subak Pakel II* merasa dilindungi dan ini terbukti dengan perhatian besar dari Pemda Bali melalui Dinas Pertanian dan Dinas Kebudayaan. Khusus untuk Dinas Kebudayaan dalam kegiatan yang bersifat teknis sering melakukan kolaborasi dengan Kementerian Agama.
- 3) Terdapat kesadaran moral, terutama bagi pemilik tanah, rumah dan usaha swasta yang berdiri di atas tanah atau bekas sawah. Menariknya mereka ikut terlibat aktif untuk mempertahankan *Pura Subak Pakel II* dan bahkan ikut berkontribusi. Kesadaran ini diikat dengan sebuah legitimasi agama di mana mereka harus tetap menghormati *Bhatara Sri* sebagai pemilik atau penguasa tanah.

b) Faktor Penghambat

- 1) Secara administrasi, menurut para *prajuru*, terdapat beberapa kesulitan yang cukup berat yang mereka rasakan. Misalnya, kelengkapan SIUP bagi penjual bahan bangunan dan SIUP bagi para tukang. Di Bali syarat ini tidak begitu lazim dimiliki oleh penjual dan tukang bangunan.
- 2) Pencairan dana bantuan dan realisasinya sangat berhubungan dengan hari baik atau *dewasa hayu* saat akan memulai pekerjaan. Jika *dewasa hayu* belum ditentukan maka akan berdampak pada pencairan dana, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil pekerjaan.

- 3) Keengganan anak-anak muda untuk meneruskan profesi petani serta keterbatasan lahan sawah menjadi hambatan yang cukup signifikan yang akan menjadi masalah sekaligus tantangan di masa depan.

BAB IV PENUTUP

C. Simpulan

1. Pemberdayaan tempat ibadah umat Hindu di Bali, khususnya di Denpasar sangat berkaitan erat dengan klasifikasi pura berdasarkan ikatan keluarga dari keluarga *batih* (inti) hingga kumpulan keluarga besar, berdasarkan kesamaan profesi, berdasarkan wilayah teritorial dan berdasarkan kesamaan manusia secara universal. Masing-masing klasifikasi pura tersebut memiliki *pengempon* atau komunitas di pura bersangkutan, sehingga pemberdayaan tempat ibadah sangat tergantung pula dari program dan kegiatan yang mereka (baca: *pengempon*), baik yang rutin maupun kegiatan-kegiatan insidental untuk komunitas internalnya. Misalnya, *Pura Kawitan* diberdayakan untuk para keluarga yang memiliki hubungan sedarah; *pura swagina* diberdayakan untuk *pengempon* yang memiliki kesamaan profesi dan fungsi; *Pura Kahyangan Tiga* untuk *pengempon* yang berada di wilayah yang sama secara teritorial, dan *Pura Kahyangan Jagat* untuk semua umat Hindu tanpa memandang perbedaan.
2. Berdasarkan pemetaan seperti tersebut, modal sosial yang dimiliki sebuah pura untuk memberdayakan *pengemponnya* akan secara konkrit, dirasakan, dinikmati dan tepat sasaran untuk para *pengemponnya*, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui koperasi, LPD, pasar, dll; kebutuhan seni-budaya melalui *sekeha* atau kelompok-kelompok sosial yang memberikan kesempatan kepada umat untuk mengekspresikan seni dan budayanya; kebutuhan rohani melalui aktivitas keagamaan. Artinya pemberdayaan pura untuk memenuhi kebutuhan manusia akan nilai-nilai ketuhanan yang bersifat rohaniah diimplementasikan ke dalam konsep *parahyangan*, kebutuhan manusia secara jasmaniah (*pawongan*) dan kebutuhan untuk hidup di alam semesta atau lingkungan hidup (*palemahan*). Tujuan ini adalah inti dari ajaran *Tri Hita Karana* yang implementasinya secara konkrit juga dilakukan di pura berdasarkan *Tri Mandala*, yaitu *nista mandala* untuk kegiatan manusia secara profan, *madya mandala* masih untuk kegiatan manusia tetapi lebih berorientasi kepada Tuhan dan *utama mandala* total untuk Tuhan.
3. Berdasarkan dua poin di atas, apa yang dimaksud dengan *total management quality* telah secara nyata dan langsung dilakukan oleh para *pengempon* secara

mandiri dan otonom meskipun berada dalam atap yang sama, yakni manajemen pemerintahan baik melalui *desa pakraman* maupun *desa dinas*. Artinya *Pengempon Pura Kawitan, Pura Swagina, Pura Kahyangan Tiga dan Pura Kahyangan Jagat* tetap berada dalam satu wilayah. Sinergi ini menghasilkan kemampuan untuk membagi kekuatan kepada para *leader* dari masing-masing komunitas (*pengempon*). Sebagai contoh, pemberdayaan *Pura Kawitan* akan diserahkan kepada *kelihan maksan* atau *pemaksan*; *pura swagina*, seperti *subak* diserahkan *kelihan subak*; *Pura Kahyangan Tiga* diserahkan kepada *Jero Bendesa* dan *Pura Kahyangan Jagat* oleh Pemda, Kementerian Agama dan majelis umat Hindu. Selain itu, dengan berdasarkan *awig-awig* yang dibuat di masing-masing pura, akuntabilitas dari pemberdayaan umat dan pengelolaan bantuan misalnya, dapat dilakukan secara transparan karena legitimasi agama berupa *awig-awig* menjadi pengikat moral kepercayaan umat. Melalui *awig-awig* pula, para *pengempon* dan pengurus *pengempon* serta para *leadernya* (*kelihan* dan *bendesa*) akan diikat secara spiritual dan *niskala* melalui konsep *karmaphala* yang tidak bisa dilanggar.

D. Rekomendasi

1. Dalam memberikan bantuan, sebaiknya mengakomodir spesifikasi yang berlaku di daerah tertentu dengan kearifan lokal yang digunakan sebagai falsafah bagi penganutnya. Hal ini perlu dipertimbangkan karena seringkali terjadi perbedaan yang sangat krusial ketika spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan spesifikasi di daerah. Di Bali, misalnya, barang atau benda yang dipersembahkan ke pura tidak dapat dinilai dengan ukuran uang karena selain mengandung dimensi estetis juga berdimensi religius, yakni sebagai *yajna* atau persembahan suci
2. Perencanaan bantuan perlu mempertimbangkan kebutuhan riil dari pengguna bantuan, termasuk standar kuantitas nominal sebuah bantuan. Misalnya, perlu dipikirkan bantuan utuh terhadap sebuah bangunan pura, bukan sepotong-sepotong karena akan berdampak pula dalam menyusun LPJ. Misalnya, bantuan pembangunan *bale kulkul, bale agung, padmasana*, dll, bukan bantuan *kulkulnya* saja, atau *balenya* saja.
3. Perlu standarisasi dari peruntukan dan pertanggung jawaban atas bantuan yang diterima karena masing-masing instansi memiliki ukuran yang berbeda-beda,

sehingga berdampak pada orientasi para penggunanya. Misalnya, LPJ kepada Pemda Bali relatif lebih mudah dan sederhana dengan LPJ kepada Kementerian Agama. Kendalanya memang karena Kementerian Agama adalah instansi vertikal sehingga belum bisa mengadopsi sistem tersebut.

4. Atas berbagai kendala yang ditemukan, perlu secara terus menerus dilaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis hingga pendampingan kepada pengguna bantuan, sehingga tertib administrasi sampai ke tingkat bawah yang menjadi keinginan pemberi bantuan, khususnya Kementerian Agama dapat melakukan perencanaan yang matang, pengawasan yang maksimal dan evaluasi yang komprehensif, sekaligus membelajarkan umat untuk menjadi masyarakat yang berintegritas sejalan dengan agama yang dianut dan akuntabel dengan menganut prinsip transparansi [*]

DAFTAR PUSTAKA

- Coleman, J.S., *Social Capital In Creation of Human Capital*, American Journal of Sociology, 94 Supplement: S95-120.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. 2007. *Pedoman Pemberdayaan Majid (Melalui Aspek Idarah, Imarah, dan Ri'ayah)*.
- Fukuyama F., 1995. *The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. Newyork: Free Press.
- Halpen, David. 2005. *Social Capital*. Cambridge: Polity.
- Haryatmoko. 2010. *Habitus dan Kapital dalam Strategi Kekuasaan, Teori Strukturalisasi Pierre Bourdieu*. Disampaikan dalam Seminar di Pascasarjana Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia.
- Mahin, Marko. 2009. *Kaharingan: Dinamika Agama Dayak di Kalimantan Tengah*. Disertasi. Depok: Program Pascasarjana Antropologi, FISIP, UI.
- Nordholt, Henk Schulte. 2010. *Bali Benteng terbuka 1995-2005*. Terjm. Arif B. Prasetyo dari *Bali, an open fortress, 1995-2005. Regional autonomy, electoral democracy and entrenched identities*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Pemerintah Daerah Tingkat I Bali. 1993/1994. *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek Agama Hindu I- XV*.
- Putnam, R.D., 1993. *Marking Democracy Work: Civil Tradition In Modern Italy*. Princeton NJ: Princeton University Press.
- Picard, Michel. 2006. *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Terjm. Jean Couteau dan Warih Wisatsana dari *Bali: Tourism Culturel et culture touristique*, 1992. Jakarta: Forum Jakarta-Paris.
- Rais, Rahmat. 2009. *Modal Sosial Sebagai Strategi Pengembangan Madrasah*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Siwananda, Sri Swami. 2003. *Inti Sari Ajaran Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Tim Penyusun. 2013. *Profil Kementerian Agama Kota Denpasar*. Denpasar: Kementerian Agama Kota Denpasar.
- Tim Penyusun. tt. *Ika Likita (Monografi Desa Pakraman Ubung)* Denpasar: Desa Pakraman Ubung.
- Tim Penyusun. 1999/2000. *Monografi Pura Subak Pakel*. Denpasar: Pura Subak Pakel
- Tim Penyusun. 2013. *Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Tahun 2013*.
- Tim Penyusun. 2014. *Rekapitulasi Laporan Keuangan Desa Pakraman Ubung Tahun 2013 dan 2014*.
- Wiana, I Ketut & Raka Santeri. 1993. *Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-Abad*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Wiana, I Ketut. 1995. *Yajña dan Bhakti dari Sudut Pandang Agama Hindu*. Denpasar: Pustaka Manikgeni.
- Wiana, I Ketut. 2006. *Menyayangi Alam Wujud Bhakti Pada Tuhan*, Surabaya: Paramita.
- Wiana, I Ketut. 2007. *Tri Hita Karana menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.